

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Februari | Tahun 2024 No. 51

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



PKS

*Kritisi Presiden Boleh  
Berkampanye dan Memihak*

## *HNW Ingatkan Soal Abuse of Power*

*dan etika bernegara*



# Penguasa Nir Empati, Alarm Berbunyi Keras!!

Ada rasa cemas yang tak terelakkan, bahwa setiap langkah yang diambil bukan untuk membawa kesejahteraan, melainkan untuk mengukuhkan dan memperpanjang dominasi keserakahan.

Ketika kita mengamati peran penguasa saat ini, ada satu kata yang menyesakkan dada: khawatir. Khawatir bukan hanya tentang ketamakan, melainkan tentang bagaimana penyalahgunaan kekuasaan ini bisa meruntuhkan pondasi Republik, mendorongnya ke dalam jurang yang semakin dalam. Kekhawatiran ini tidak sekadar soal etika dan nalar, melainkan bagaimana kita mungkin

terjerembab dalam kubangan kegelapan peradaban.

Ada rasa cemas yang tak terelakkan, bahwa setiap langkah yang diambil bukan untuk membawa kesejahteraan, melainkan untuk mengukuhkan dan memperpanjang dominasi keserakahan. Penguasa hari ini tidak lagi merasa malu memamerkan keberpihakan mereka yang nyata-nyata menumpang pada keringat rakyat, menggunakan fasilitas

negara dan merusak infrastruktur publik. Bahkan, masukan dan kritik dianggap seperti riak-riak di tepi pantai yang mudah dijinakkan, dipecah, dan dihapus.

Pesohor dijadikan pemikat di penghujung waktu, seolah-olah menjadi satu-satunya penyeimbang kegelapan yang merayap. Padahal, rakyat hidup dalam tekanan beban keseharian, jauh dari sorotan hingar-bingar para penghibur

politik. Mereka hidup dalam ruang hampa, di mana setiap tanggung jawab keseharian membentang tanpa jeda.

Bansos disebar tanpa prosedur, BLT dibagikan tanpa proses administrasi. Wajah-wajah lelah yang menanggung beban harian dicampakkan begitu saja, tak lagi menjadi prioritas. Ironisnya, dalam situasi ini, rakyat seakan terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan yang seharusnya

melindungi mereka.

Ketika alarm berbunyi keras, memanggil untuk merespon dan menyelesaikan masalah, kita dihadapkan pada realitas yang menggugah. Penguasa Nir Empati harus menyadari bahwa kepemimpinan bukanlah panggung untuk memainkan peran, melainkan panggilan untuk mengayomi dan memimpin rakyatnya menuju kemanusiaan yang sejati. ●



Kritisi Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak,

## HNW Ingatkan Soal Abuse of Power dan Etika Keteladanan Bernegara

Jakarta (24/01) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo agar tidak terjadi abuse of power, dan etika keteladanan bernegara terkait pernyataannya bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam perhelatan pemilihan umum (pemilu).

HNW sapaan akrabnya menyampaikan memang ada ketentuan UU yang sekilas bisa dijadikan rujukan, tapi HNW juga mengingatkan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang jelas dan tegas mengatur soal pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode.

“Ini merupakan ketentuan Konstitusi yang juga amanat reformasi. Yang mudah dipahami bahwa diakhir periode kedua, seperti Presiden Jokowi, diakhir masa jabatan maksimalnya di periode ke dua, maka Presiden yang bukan hanya kepala pemerintahan tapi juga kepala negara, seharusnya juga mementingkan legacy, keteladanan dan etika sebagai Presiden dengan tidak perlu cawe-cawe untuk sekalipun melalui orang lain tapi esensinya sama yaitu ‘memperpanjang masa jabatannya’. Apalagi bila ‘orang lain’ itu adalah anggota keluarganya sendiri. Karena hal

itu juga bentuk nepotisme yang ditolak oleh Reformasi dan menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan Konstitusi, sehingga harusnya dihindari oleh Presiden, agar tidak berpotensi dimakzulkan oleh DPR,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (24/01).

“Pembatasan dua periode masa jabatan Presiden ini merupakan ketentuan yang membedakan dengan jabatan-jabatan kenegaraan lainnya,” tambahnya.

Ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 itu-lah yang seharusnya menjadi acuan dalam menafsirkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). HNW mengakui memang Pasal 299 UU Pemilu memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk berkampanye, dengan berbagai persyaratannya. Namun, yang perlu ditekankan di dalam memahami ketentuan itu adalah untuk ‘berka-

## Kritisi Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak, HNW Ingatkan Soal Abuse of Power dan Etika Keteladanan Bernegara

### « SEBELUMNYA

mpanye', bukan untuk memihak kepada salah satu calon.

"Artinya ketentuan itu seharusnya ditafsirkan bahwa Presiden dapat berkampanye untuk dirinya ketika dirinya secara konstitusi dimungkinkan untuk mencalonkan kembali sebagai salah satu kontestan Pilpres. Namun, apabila dia sudah tidak bisa mencalonkan kembali karena sudah dua periode, secara etika, presiden mestinya tidak perlu cawe-cawe lagi dengan berkampanye, apalagi kampanye terang-terangan memihak kepada salah satu calon. Karena yang langsung terkesan di mata rakyat bahwa Presiden tidak memosisikan diri sebagai Kepala Negara yang mengayomi semua pasang calon Presiden/wakil Presiden, dan bahkan Presiden tidak konsisten melaksanakan sumpah jabatan dengan menjalankan keseluruhan aturan perundangan," tukasnya.

HNW menegaskan apalagi bila UU Pemilu dibaca secara utuh, setelah Pasal 299, ada Pasal 301 yang menegaskan bahwa "Presiden atau Wakil

Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden atau wakil presiden.

"Ketentuan itu jelas mengatur kampanye Presiden ketika yang bersangkutan maju kembali secara salah satu capres, bukan untuk yang sudah berada pada periode ke dua yang tidak memungkinkan untuk mencalonkan kembali sebagai calon Presiden," ujarnya.

HNW juga mengingatkan kembali sumpah jabatan yang diucapkan Presiden Jokowi yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Presiden bersumpah untuk menjalankan tugasnya sebagai Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan memegang teguh Undang - Undang Dasar 45, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan seluruh-lurusnya...".

"Akan sangat baik dan menjadi legacy kenegarawanan Presiden Jokowi bila sumpah

jabatan ini dipegang teguh, dan dijalankan dengan benar, sehingga Presiden bisa menahan diri sehingga terhindar dari berlaku tidak netral dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon," tambahnya.

Apalagi lanjut HNW, Presiden Jokowi sebelumnya berkali-kali menegaskan bahwa aparat negara harus netral dalam Pemilu 2024. Bahkan mengancam akan menghukum ASN yang tidak netral.

"Sebelumnya Presiden Jokowi sebutkan aparat negara harus netral, tetapi sekarang dirinya menyatakan bahwa bahkan Presiden bisa berpihak. Tentu ini akan berpihak, yang mudah diartikan sebagai akan cawe-cawe dengan laku ikut berkampanye untuk satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan karenanya tidak netral. Bagaimana mungkin ASN disuruh netral dan akan diberikan sanksi bila tidak netral, sementara Presiden sendiri justru menconthokan ketidaknetralan," ujarnya.

"Tentu akan lebih bagus untuk Presiden dan kepercayaan Rakyat terhadap pimpinan Negara, Pemilu dan legitimasi hasilnya, bila aturan ditegakkan secara komprehensif dan adil, dan Presiden Jokowi sebagai pimpinan negara menjadi teladan dalam melaksanakan etika dan aturan perundangan pada kemeryeluruhannya, bukan hanya pada bagiannya saja," pungkasnya.



"Akan sangat baik dan menjadi legacy kenegarawanan Presiden Jokowi bila sumpah jabatan ini dipegang teguh, dan dijalankan dengan benar, sehingga Presiden bisa menahan diri sehingga terhindar dari berlaku tidak netral dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon,"

**Dr. H.M. HIDAYAT  
NUR WAHID, M.A.**

Wakil Ketua MPR RI



# KRISIS KEMANUSIAAN DI PALESTINA

## Data Kerusakan Bangunan

 **134**  
kantor  
pemerintahan  
hancur

 **95** sekolah dan  
universitas  
hancur serta  
berhenti total  
**295** rusak  
sebagian

 **138**  
masjid  
hancur  
total  
**240**  
hancur  
sebagian

 **3**  
gereja  
hancur

 **121**  
mobil ambulans  
rusak total

 **69.000**  
bangunan  
tempat tinggal  
hancur total

**290.000**  
hancur  
sebagian

 **30**  
rumah  
sakit  
berhenti total

**53** pusat  
kesehatan  
berhenti total

## Jumlah Korban dan Pengungsi

 **1.932**  
pembantaian

 **30.084**  
meninggal  
dan hilang

 **59.000**  
luka-luka

 **2.600**  
ditawan, di antaranya  
99 personel medis  
dan 10 jurnalis

 **2.000.000**  
rakyat Palestina  
mengungsi

 **400.000**  
penyakit menular



“ Dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupansi, dan penjajahannya di wilayah Palestina.

Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama.

**DR. Salim**  
Ketua Majelis Syuro PKS





## Fraksi PKS Serukan Boikot Israel dari Semua Forum Internasional

### Jakarta (27/01) --- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memilih walk out

dari Sidang Dewan Keamanan PBB di New York ketika Dubes Israel mendapat kesempatan bicara.

"Apresiasi Bu Menlu, walk out saat Dubes Israel bicara untuk menunjukkan sikap Indonesia atas kebiadaban Israel yang tak kunjung menghentikan agresinya di Gaza Palestina. Sikap ini juga untuk melawan pernyataan PM Netanyahu yang tidak akan membiarkan negara Palestina berdiri," ungkap Jazuli.

Sikap itu sekaligus untuk menunjukkan wibawa kemanusiaan dunia yang diinjak-injak oleh zionis Israel. Sehingga Israel tidak layak duduk dan berdiri sejajar dengan negara-negara beradab di dunia.

"Untuk itu, Fraksi PKS turut menyerukan agar Israel diboikot dari berbagai forum internasio-

nal karena kebiadaban dan penjajahannya atas bangsa Palestina. Israel juga terbukti tidak mematuhi berbagai aturan dan hukum internasional," tegas Anggota DPR Dapil Banten ini.

Menurut Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IFP) ini saatnya negara-negara beradab dan memiliki perikemanusiaan membuat demarkasi yang jelas dengan penjajah Israel, termasuk bersikap tegas terhadap negara-negara yang mendukung penjajahan Israel.

"Harus ada langkah kolektif dan korektif dari negara-negara di dunia untuk bertindak tegas atas tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina dengan memboikot dan memaksa Israel menghentikan agresinya di tanah Palestina," pungkas Jazuli.

"Harus ada langkah kolektif dan korektif dari negara-negara di dunia untuk bertindak tegas atas tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina dengan memboikot dan memaksa Israel menghentikan agresinya di tanah Palestina,"

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



## HNW Serukan Indonesia Galang Dukungan Internasional Kawal Putusan Sela Mahkamah Internasional

Jakarta (28/01) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi sebagian putusan Mahkamah Internasional terkait tuntutan Afrika Selatan atas Israel dan menyerukan pemerintah Indonesia

untuk memaksimalkan usaha menggalang dunia internasional untuk mengawal implementasi putusan sela Mahkamah Internasional (International Court of Justice) atas gugatan Afrika Selatan terhadap kejahatan genosida yang dilakukan Israel kepada Palestina (Gaza).

“Walaupun seperti Afrika Selatan yang sangat mengkritisi putusan Mahkamah Internasional karena tidak ada keputusan soal pencatatan senjata segera dan permanen, tetapi ada beberapa poin penting dalam putusan sela tersebut yang perlu dikawal bersama, agar hukum internasional benar-benar memiliki kekuatan mengikat, dan kejahatan genosida Israel atas Gaza bisa dihentikan dan dikenakan sanksi hukum,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (27/01/2024).

Salah satu poin putusan tersebut adalah bahwa Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi terhadap gugatan AfSel terhadap Israel. Ini merupakan hal yang pertama kali ditolak oleh Israel bahwa Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi

terhadap kasus tersebut.

“Dan sikap Israel itu ditolak oleh mayoritas hakim di Mahkamah Internasional,” ujarnya.

HNW menambahkan bahwa dari sembilan gugatan provisi (agar segera diputus dalam putusan sela, tidak menunggu hingga putusan akhir), ada enam poin yang dikabulkan oleh Mahkamah Internasional. Beberapa poin tersebut adalah Israel diperintahkan untuk mengambil semua langkah – termasuk aksi militernya – untuk mencegah terjadinya kejahatan genosida, memberikan akses penyaluran bantuan internasional, membuka akses kepada tim pencari fakta, dan melaporkan dalam waktu satu bulan terkait perintah Mahkamah Internasional itu dilaksanakan oleh Israel.

Lebih lanjut, HNW berharap waktu satu bulan ini benar-benar digunakan oleh masyarakat internasional untuk memantau sepak terjang Israel terhadap aksi militer dan kejahatannya di Jalur Gaza, Palestina.

## HNW Serukan Indonesia Galang Dukungan Internasional Kawal Putusan Sela Mahkamah Internasional

### « SEBELUMNYA

“Karena bahkan beberapa jam setelah putusan Mahkamah Internasional itu dibacakan, ternyata militer Israel diinformasikan telah menyerang secara brutal rumah sakit di Khan Younis, wilayah selatan Jalur Gaza, dengan korban mayoritasnya lagi-lagi dari kaum wanita dan anak-anak,” ujarnya.

HNW juga meminta Pemerintah Indonesia dan aliansinya perlu memastikan putusan sela ini bisa berjalan/dilaksanakan oleh Israel dengan baik dan benar.

“Dan bila Israel kembali abai tidak melaksanakan putusan Mahkamah Internasional sehingga berujung ke Dewan Keamanan PBB. Harus diesak dan ditegaskan oleh Indonesia dan aliansinya bahwa tidak boleh ada lagi veto. Karena bila masih ada yang melakukan veto, maka komitmennya terhadap rule of law serta penyelesaian perang dan hadirnya perdamaian di Timur Tengah dipertanyakan ulang, karena ketentuan ini sudah merupakan putusan peradilan Mahkamah

Internasional yang mengikat para anggotanya,” tuturnya.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mempertimbangkan eskalasi di Gaza dan sekitarnya, HNW juga berharap agar putusan akhir Mahkamah Internasional terhadap gugatan Afrika Selatan ini tidak diputus dalam waktu yang lama.

“Ini memang baru putusan sela, belum putusan akhir. Dan beberapa pakar menghitung putusan akhir biasanya mencapai waktu tiga atau empat tahun. Ini tentu terlalu lama. Dengan potensi makin banyaknya korban genosida Israel di Gaza yang berjatuhannya,” ujarnya.

“Karenanya sidang kasus yang menjadi pokok persoalan ini mestinya dilakukakan dengan segera. Mahkamah Internasional harusnya selalu mengingat prinsip hukum bahwa ‘justice delayed is justice denied’ (keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan), apalagi bila karena itu genosida Israel benar-benar makin brutal dan korban pun makin banyak berjatuhannya,” pungkasnya.



“Walaupun seperti Afrika Selatan yang sangat mengkritisi putusan Mahkamah Internasional karena tidak ada keputusan soal gencatan senjata segera dan permanen, tetapi ada beberapa poin penting dalam putusan sela tersebut yang perlu dikawal bersama, agar hukum internasional benar-benar memiliki kekuatan mengikat, dan kejahatan genosida Israel atas Gaza bisa dihentikan dan dikenakan sanksi hukum,”

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI





## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI





## Wakil Ketua Komisi 1 FPKS Tanggapi Mahkamah Internasional Kabulkan Gugatan Afsel atas Genosida Israel di Palestina

Jakarta (27/01) -- Internasional Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda secara resmi memerintahkan Zionis Israel melakukan semua langkah untuk segera menyetop genosida di Jalur Gaza, Palestina.

"Apresiasi yang sangat tinggi kepada negara sahabat kita Afrika Selatan yang berusaha keras menghentikan genosida di Gaza dengan menggugat di Mahkamah Internasional dan apa yang dikeluarkan oleh pengadilan pada Jumat ini, adalah keputusan internasional pertama bahwa genosida itu nyata di Gaza" jelas Abdul Kharis Almasyhari Wakil Ketua Komisi 1 DPR FPKS dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (27/01).

Putusan Mahkamah Internasional juga memerintahkan Zionis untuk mencegah pasukan militernya tidak membunuh warga Palestina maupun menyebabkan cedera fisik dan mental yang serius, menghancurkan kehidupan dan mencegah kelahiran warga Palestina.

"Saya sangat terkejut bahwa pengadilan tidak mengeluarkan keputusan yang jelas untuk segera melakukan gencatan senjata, meskipun hal tersebut termasuk dalam keputusannya untuk menerima klaim Afrika Selatan bahwa entitas tersebut melanggar

Konvensi Genosida, dan hal ini kehilangan nilai dari keputusan lain dan tindakan sementara," jelas legislator asal Solo ini.

Keputusan yang mencakup tindakan sementara tidak mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah entitas Zionis di Jalur Gaza dalam bentuk fisik, moral, psikologis dan sosial yang paling buruk.

"saya tegaskan bahwa kegagalan mengeluarkan resolusi internasional yang mewajibkan Zionis Israel untuk menghentikan agresi terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan sistem internasional

dan lembaga-lembaganya untuk melindungi hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat atas kebebasan akibat hegemoni Amerika-Zionis atas negara tersebut," tegas Kharis.

Kharis meminta Kementerian Luar Negeri RI segera membuat langkah lebih maju lagi melalui berbagai jalur internasional yang memungkinkan untuk memberikan tekanan yang lebih besar dalam segala bentuk terhadap negara-negara dominan untuk menghentikan agresi barbar terhadap Jalur Gaza.

"Putusan yang dibacakan ICJ belum final terkait gugatan genosida yang dilayangkan Afrika Selatan meskipun secara hukum internasional itu mengikat dan tanpa banding, Indonesia harus terus mengawal dan mendorong dengan segala daya upaya bersama semua negara untuk menghentikan genosida di jalur Gaza," tutup Kharis.

meskipun secara hukum internasional itu mengikat dan tanpa banding, Indonesia harus terus mengawal dan mendorong dengan segala daya upaya bersama semua negara untuk menghentikan genosida di jalur Gaza,"

**Dr. H. ABDUL KHARIS  
ALMASYHARI**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



## Aleg PKS: Kecam PBB, Indonesia Apresiasi Gugatan Afsel di Mahkamah Internasional

Jakarta (28/1) --- Gugatan Afrika Selatan yang diajukan ke International Court of Justice (ICJ) terhadap genosida yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina menghasilkan putusan agar Israel menghentikan genosida.

Perjuangan Afrika Selatan dan keputusan mahkamah internasional ini, menurut Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta patut diapresiasi dan didukung oleh negara-negara di dunia.

"Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi kepada Afrika Selatan yang telah mengajukan gugatan dan hasilnya Israel diputuskan telah melakukan genosida kepada rakyat Palestina," ungkapnya.

Namun, keputusan ICJ masih setengah-setengah disatu sisi memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah sesuai kewenangannya untuk mencegah tindakan genosida di Gaza.

"Namun, pengadilan tersebut tidak mengeluarkan perintah soal gencatan senjata padahal langkah ini sebagai satu cara menghentikan genosida," ujar Sukamta.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini menyindir PBB tidak lagi jadi menjadi lembaga yang menjaga perdamaian.

"Ketika mayoritas negara di dunia pendukung Palestina kehilangan harapan,

kepercayaan, rasa keadilan dari Perserikatan Bangsa Bangsa, Mahkamah Internasional menjadi penjaga marwah pengadilan internasional dan menjaga tingkat keadilan dunia," pungkasnya.

PBB, kata Sukamta, telah gagal menjaga perdamaian dunia dan melindungi hak asasi manusia rakyat Palestina.

"PBB tak berdaya dihadapan Israel dan Amerika Serikat. Mahkamah Internasional menjadi harapan

baru tentang keadilan dunia."

Sukamta juga mengingatkan Israel untuk tunduk pada perintah mahkamah internasional.

"Ketundukan Israel terhadap putusan mahkamah Internasional merupakan kewajiban walaupun Israel tidak meratifikasi Konvensi Genosida 1948 namun Statuta Roma telah diratifikasi oleh Palestina dan diterima oleh IJC. Putusan ini juga harus di dukung tekanan politik dan ekonomi internasional terhadap Israel," jelas Sukamta.

Sebagai informasi sudah lebih dari 3 bulan Israel melakukan genosida kepada rakyat Palestina. Upaya penghentian genosida harus terus dilakukan untuk menyelamatkan jutaan rakyat Palestina.

"Ketundukan Israel terhadap putusan mahkamah Internasional merupakan kewajiban walaupun Israel tidak meratifikasi Konvensi Genosida 1948 namun Statuta Roma telah diratifikasi oleh Palestina dan diterima oleh IJC. Putusan ini juga harus di dukung tekanan politik dan ekonomi internasional terhadap Israel,"

**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI



## Mardani Nilai Penggunaan Aplikasi SIREKAP Perlu Ditinjau Ulang

Jakarta (18/01) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritik penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pemilu 2024. Menurut Mardani, hingga saat ini aplikasi tersebut belum dilakukan audit serta simulasi terhadap proses didalamnya.

“Jadi dalam forum (rapat Komisi II) ini saya mengajak semuanya, kita timbang ulang SIREKAP (karena) bisa jadi bencana karena itu tidak ada audit dan kita belum melakukan simulasi ataupun verifikasi terhadap prosesnya,” kata Mardani dalam RDP bersama KPU, Baswasu dan DKPP di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan,

jika pengawasan terhadap aplikasi tersebut minim, bisa muncul kekhawatiran tersendiri akan manipulasi hasil Pemilu. Ia pun mendorong untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap Aplikasi SIREKAP. Lebih baik kalau memang untuk alat bantu (perekapan suara), teman-teman surveyor dengan quickcount-nya sudah sangat terverifikasi, murah bahkan,”

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Politisi Fraksi PKS ini menilai, jika pengawasan terhadap aplikasi tersebut minim, bisa muncul kekhawatiran tersendiri akan manipulasi hasil Pemilu. Ia pun mendorong untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap Aplikasi SIREKAP.

“Lebih baik kalau memang untuk alat bantu (perekapan suara), teman-teman surveyor dengan quickcount-nya sudah sangat terverifikasi, murah bahkan,” sambung Politisi PKS ini.

Diketahui, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi Suara, yang merupakan platform digital yang menjadi jantung proses penghitungan suara pada pemilu 2024.

Sirekap diharapkan membawa perubahan signifikan dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan hasil yang akurat dan real-time.

Sirekap memiliki dua operator, di antaranya yaitu Sirekap 1 dan Sirekap 2, yang bertugas mengisi aplikasi sirekap pada pelaksanaan pemungutan suara. Sirekap 1 dan Sirekap 2 memiliki tugas yang sama, yaitu mengambil foto hasil pemilihan, melakukan koreksi angka, dan mengirimkan data ke sistem.

Sirekap 1 dan sirekap 2 juga bertanggung jawab untuk mengelola daftar hadir dan mencatat kejadian khusus yang terjadi di TPS.



## Berkaca Kasus Firli Bahuri, Habib Aboe: Presiden Jokowi Harus Lebih Cermat Seleksi Kandidat Calon Pimpinan KPK!

Jakarta (23/01) – Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyoroti proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengganti Firli Bahuri.

Anggota Komisi III ini menyampaikan bahwa sebelumnya Komisi III DPR RI telah mengusulkan kepada presiden untuk tidak perlu mencari pimpinan KPK pengganti, mengingat periode kepemimpinan KPK dan

efektifitas kinerja.

“Komisi III kemarin sempat mengajukan usulan kepada presiden untuk tidak perlu lagi mencari dan mengangkat pimpinan KPK sebagai pengganti Firli Bahuri, karena masa jabatan pimpinan KPK sebentar lagi mau habis dan Komisi III menilai bahwa dengan pimpinan KPK yang ada saat ini masih bisa menjalankan tugas dengan baik” ujarnya.

Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa jika presiden tetap memutuskan mengangkat pengganti calon pimpinan KPK, maka harus berkaca dari kasus Firli Bahuri maka pemerintah harus berhati-hati dalam menyeleksi,

pemerintah juga harus cermat dalam melihat rekam jejak.

“Kalau presiden tetap memutuskan untuk mencari calon pimpinan dan mengangkat pengganti Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK, maka presiden harus berkaca dari kasus Firli Bahuri, sehingga diperlukan penerapan seleksi yang lebih ketat di DPR, kecermatan dan ketelitian pemerintah dalam melihat rekam jejaknya” ujarnya.

Diakhir, Habib Aboe menyampaikan bahwa kehati-hatian sangat diperlukan dan penting dalam menyeleksi dan memilih calon pimpinan KPK tersebut agar kasus korupsi yang dilakukan oleh Firli Bahuri tidak terulang kembali.

Kalau presiden tetap memutuskan untuk mencari calon pimpinan dan mengangkat pengganti Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK, maka presiden harus berkaca dari kasus Firli Bahuri, sehingga diperlukan penerapan seleksi yang lebih ketat di DPR, kecermatan dan ketelitian pemerintah dalam melihat rekam jejaknya”

### **HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI



## Aleg PKS Kritisi Impor Beras 3 Juta Ton

Jakarta (16/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, mengemukakan kebijakan pemerintah terkait impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun 2023 yang merupakan impor beras terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Dalam konferensi pers yang digelar hari ini di gedung DPR, Slamet menyoroti beberapa aspek kebijakan tersebut yang dinilai kontroversial dan ditinggalkan sarat akan kepentingan politis.

Menurut politisi senior PKS tersebut, impor beras dalam jumlah sebesar itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampaknya pada petani lokal.

Slamet menyatakan bahwa langkah ini dapat mengancam kedaulatan pangan Indonesia dan merugikan para petani yang sudah berjuang keras untuk meningkatkan produksi beras lokal.

"Kami memahami bahwa stabilitas pasokan beras nasional adalah hal yang sangat penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disaat

ancaman krisis iklim yang tengah melanda Indonesia saat ini. Namun, kebijakan impor dalam jumlah yang besar sebanyak 3 juta ton tentu harus diperhitungkan dengan matang agar tidak merugikan petani dalam negeri," ujar Slamet.

Lebih lanjut, anggota legislative dapil kota dan kabupaten sukabumi tersebut menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam proses impor tersebut. Ia mendesak pemerintah untuk lebih terbuka terkait mekanisme pemilihan pemasok dan kebijakan harga yang diterapkan dalam impor beras sebesar itu.

"Transparansi dalam proses impor harus diutamakan. Kami meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan

yang jelas mengenai mekanisme pemilihan pemasok, kebijakan harga yang diterapkan dan tujuan impor dalam skala besar tersebut. Ini penting agar masyarakat dapat memahami dan menilai kebijakan ini secara objektif apalagi kegiatan impornya justru semakin massif mendekati proses pemilu sehingga dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan suksesi pemilu," tambah Slamet.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menegaskan perlunya penguatan ketahanan pangan melalui dukungan nyata terhadap petani lokal yang merupakan sikap PKS sejak lama dan ini merupakan gagasan yang ditawarkan kepada petani lokal melalui skema Contract Farming dimana pemerintah berkontrak dengan petani dalam pembelian hasil panen dengan harga dan kualitas yang ditentukan.

"Negara ini sudah salah urus terkait dengan pertanian nasional yang lebih mengutamakan impor dibanding dengan produksi petani. Kedepannya kita harus berkontrak dengan petani sehingga kita bisa menekan impor beras tiap tahunnya," ungkapnya.

Terakhir Slamet mengajak pemerintah untuk lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dalam negeri sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan pasokan beras kedepannya.



"Transparansi dalam proses impor harus diutamakan. Kami meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pemilihan pemasok, kebijakan harga yang diterapkan dan tujuan impor dalam skala besar tersebut. Ini penting agar masyarakat dapat memahami dan menilai kebijakan ini secara objektif apalagi kegiatan impornya justru semakin massif mendekati proses pemilu sehingga dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan suksesi pemilu,"

**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI





Impor Beras Hingga Rekor  
Mencapai 3 Juta Ton,

## Andi Akmal: Cita-Cita Kedaulatan Pangan Bisa Ambyar

Jakarta (17/01) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dalam jumlah besar.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton selama tahun 2023, menandai kenaikan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dari publikasi melalui Konferensi pers BPS pada Senin, 15 Januari 2024 lalu, yang menyatakan bahwa importasi beras ini adalah impor beras terbesar dalam lima tahun terakhir, meningkat 613,61% dibandingkan tahun 2022.

Dalam penjelasannya, Pasluddin mengkritik keras kebijakan ini sebagai indikasi kegagalan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Ia menekankan bahwa ketergantungan pada impor beras da-

lam jumlah besar adalah langkah mundur untuk Indonesia.

"Cita-cita kedaulatan pangan kita telah Ambyar. Kita harus menanyakan, mengapa tiba-tiba ada kebutuhan mendesak untuk mengimpor beras dalam jumlah yang sangat besar? Apakah ini menunjukkan ada masalah dalam manajemen stok pangan nasional?" tanya Andi Akmal Pasluddin, mengungkapkan kekhawatirannya.

Akmal menambahkan, ada kemiripan dengan menjelang pemilu 2019, pemerintah tiba-tiba juga melakukan importasi beras sebesar 2 juta ton.

Politisi PKS ini juga menyoroti dampak negatif impor ini terhadap petani lokal.

Menurutnya, impor dalam skala besar dapat menyebabkan penurunan harga beras di pasar domestik, yang pada gilirannya akan merugikan para petani di Indonesia.

Lebih lanjut, pria kelahiran Kabupaten Bone ini mengkritik ketergantungan impor dari negara-negara tertentu, dengan Thailand, Vietnam, dan Pakistan sebagai penyumbang terbesar. Akmal menilai ini sebagai strategi yang berisiko dan menyerukan diversifikasi sumber impor.

Dalam konteks yang lebih luas, Anggota Badan Anggaran ini mengkritisi peningkatan impor di sektor serealisa, termasuk beras, sebagai indikasi lemahnya ketahanan pangan nasional.

"Ini adalah tanda peringatan bagi kita semua. Disisi lain kami FPKS menyeru penguatan pencapaian cita-cita kedaulatan pangan yang meliputi kemandirian dan ketahanan pangan, disisi lain kebijakan pemerintah dalam mengelola perberasan nasional terlihat amburadul," ujarnya.

Politisi Senior PKS di Sulawesi ini menegaskan dan mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini, Pasluddin menyarankan investasi yang lebih besar dalam riset pertanian, infrastruktur, dan dukungan bagi petani lokal, demi mencapai kemandirian pangan.

"Kita perlu fokus pada so-



"Ini adalah tanda peringatan bagi kita semua. Disisi lain kami FPKS menyeru penguatan pencapaian cita-cita kedaulatan pangan yang meliputi kemandirian dan ketahanan pangan, disisi lain kebijakan pemerintah dalam mengelola perberasan nasional terlihat amburadul,

**Dr. H. ANDI AKMAL  
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

lusi jangka panjang, bukan hanya solusi instan seperti impor. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan sektor pertanian kita," tambah Andi Akmal, menekankan pentingnya strategi jangka panjang.

Sebagai penutup, Akmal menyerukan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan

kebijakan impor beras dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.

"Langkah-langkah strategis harus segera diambil untuk mengatasi tantangan ini.

Jangan sampai ambyarnya cita-cita perberasan nasional ini semakin berlarut," tutup Andi Akmal Pasluddin.

# 1 ANIES & MUHAIMIN AMIN



*Deza  
Indragiri*

*Izuli  
Iuwaini*

*Defly  
Harun*

*Bambang  
Widjoyanto*



## Kereta Anjlok di Sidoarjo, Thoriq Hidayat: Ada Apa dengan PT. KAI?

Tasikmalaya (16/01) — Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat, mempertanyakan kinerja KAI (Kereta Api Indonesia) dan Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pasalnya kecelakaan kembali terjadi, KA Pandalungan relasi Gambir-Surabaya-Jember mengalami anjlok di Desa Tanggulangin, Sidoarjo pada Minggu (14/01/2024) pukul 07.57 WIB.

“Masih segar diingatan kita kecelakaan kereta fatal di

“Sebelum seluruh masyarakat sadar bahwa Pemerintah tengah membangun ketimpangan yang besar di bidang moda transportasi publik sebaiknya segera perbaiki kondisi yang ada. Gunakan prinsip keadilan. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar

**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**  
Anggota Komisi V DPR RI

Cicalengka, sekarang lagi-lagi ada musibah di wilayah yang menjadi tanggungjawab Kemenhub, khususnya KAI. Ada apa dengan kedua lembaga ini? Tahun yang baru idealnya memperlihatkan kinerja yang bagus. Ini malah sebaliknya,” ujar Toriq miris.

Menurut Politisi PKS bila dibandingkan keamanan dan kenyamanan kereta cepat Whoosh, infrastruktur kereta api konvensional seolah mulai tidak diperhatikan. Padahal dampak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) membuat Indonesia berutang untuk jangka panjang. Yang diperkirakan plus bunga Rp226,9 miliar per bulan.

“Sebelum seluruh masyarakat sadar bahwa Pemerintah tengah membangun ketimpangan yang besar di bidang moda transportasi publik sebaiknya segera perbaiki

kondisi yang ada. Gunakan prinsip keadilan. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar,” pungkas Toriq.

Berkali-kali kami mengusulkan agar Kemenhub membentuk lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan prasarana perkeretaapian dengan harapan prasarana perkeretaapian dapat selalu terawat dengan baik. Tidak seperti saat ini yang masih menjadi tanggungjawab PT. KAI.

“Agar Fokus, sebaiknya Dana Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) jangan dikelola oleh KAI. Mengingat beban berat yang dipikulnya untuk membayar hutang yang sangat besar ke China dalam waktu lama. Cukup Kemenhub sendiri atau badan independen baru yang mengaturnya,” tutup Toriq.



# Usulkan Panja Perkeretaapian, Sigit Sosiantomo Harap Kecelakaan Kereta Api Tak Terulang Kembali

Jakarta (18/01) — Untuk merespon berbagai musibah kecelakaan Kereta Api yang terjadi belum lama ini, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Sigit Sosiantomo mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Perkeretaapian.

Panja ini nantinya diharapkan dapat menggali akar permasalahan penyebab banyaknya kejadian kecelakaan moda transportasi kereta api di Indonesia dan menjadikan dasar untuk mereview aspek keselamatan dan keamanan perkeretaapian Indonesia serta Road Map to Zero Accident di sektor Perkeretaapian.

Dalam rilisnya, Sigit mengatakan pembentukan Panja bertujuan untuk memberikan rekomendasi

berupa langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah sebagai regulator dan pihak operator yang saat ini ditangani oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam memperbaiki manajemen perkeretaapian di Indonesia dan meningkatkan faktor keselamatan moda transportasi Kereta Api guna meminimalisir terulangnya kejadian kecelakaan kereta api di masa datang.

"Saya prihatin dengan

berulangnya kecelakaan kereta api dalam waktu yang berdekatan. Selama awal tahun 2024 saja sudah terjadi lima kecelakaan. Pertama terjadi kecelakaan fatal kereta, yaitu tabrakan kereta Turangga relasi Surabaya-Bandung bertabrakan dengan KA Lokal Bandung Raya di petak Stasiun Cicelengka-Haurpugur, Jumat (5/1/2024).

Dan selang beberapa hari kemudian, imbuhnya, terjadi kereta anjlok di Stasiun Tanggulangin. Kemudian, insiden pada perlintasan sebidang yang terjadi di tiga lokasi terpisah, yaitu Klaten, Banyuwangi, dan Tebingtinggi.

"Ini sudah mengindikasikan ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan perkeretaapian kita. Karena itu, Komisi V perlu membentuk Panja untuk menggali akar permasalahan retetan kecelakaan ini dan mencari solusi untuk direkomendasikan kepada pemerintah selaku regulator dan PT KAI sebagai operator," kata Sigit.

Dengan peningkatan jumlah penumpang, kata Sigit, seharusnya keselamatan dan keamanan kereta api menjadi poin penting. Tapi, seiring dengan peningkatan penumpang angka kecelakaan KA makin tinggi. Jika tidak segera dilakukan perbaikan perkeretaapian, Sigit khawatir target penurunan ratio kecelakaan kereta api sebesar 50% selama tahun 2010-2030



"Saya prihatin dengan berulangnya kecelakaan kereta api dalam waktu yang berdekatan. Selama awal tahun 2024 saja sudah terjadi lima kecelakaan.

**Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO**

Anggota Komisi V DPR RI

tidak akan tercapai.

"Secara kumulatif, penumpang kereta api di Indonesia sebanyak 303,57 juta orang pada Januari-Oktober 2023. Jumlah itu meningkat 37,76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) yang sebesar 220,37 juta orang. Seharusnya, peningkatan jumlah penumpang ini diikuti dengan peningkatan keamanan

dna keselamatan, baik oleh operator maupun regulator. Tapi, faktanya sebaliknya. Ada apa dengan kereta kita? Apakah karena pemerintah terlalu fokus pada kereta cepat baik secara anggaran maupun kebijakan, sehingga kereta yang lain jadi terabaikan. Ini yang akan kita gali akar permasalahannya dalam Panja," kata Sigit.

## Legislator PKS Ingatkan BMKG Mitigasi Bencana Jelang Pemilu

Jakarta (16/01) — Awal tahun 2024 ini, terjadi rentetan bencana alam seperti banjir dan longsor hingga gempa bumi yang dikhawatirkan menghambat transportasi.

Bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan curah hujan akan terjadi sangat besar di awal bulan Januari hingga satu bulan ke depan.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/01).

Syahrul menegaskan Pemerintah khususnya dalam hal ini BMKG agar harus siap memastikan adanya mitigasi bencana, terlebih dalam waktu dekat akan digelar Pemilu.

"Di bulan-bulan ini dan satu bulan ke depan, sesuai dengan perkiraan dari BMKG mengatakan bahwa curah hujan sangat besar dan ini akan tentu

mengakibatkan banyak bencana, baik itu bencana banjir, bencana longsor dan ada efeknya pada terhambatnya transportasi. Oleh karena itu, kita berharap karena kita akan menghadapi Pemilu, memastikan bahwasanya Pemerintah harus siap dengan mitigasi," ujar Syahrul.

Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan, pihaknya selaku mitra kerja tak hentinya mengingatkan BMKG agar terus menyampaikan informasi cuaca kepada seluruh pihak, salah satunya dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu khususnya dalam pengiriman logistik Pemilu ke pulau-pulau terpencil.

Mengingat di sejumlah wilayah, ada beberapa jalur laut

tidak bisa dilewati di hari-hari tertentu oleh karena kondisi cuaca.

"Seperti di Natuna misalnya, di Natuna itu ada beberapa pulau yang di bulan-bulan tertentu gak bisa dari satu pulau ke pulau lain itu melewati jalur laut, nah ini yang harus diantisipasi," tegas Legislator Dapil Riau II tersebut.

Selain itu, Syahrul mengingatkan adanya kesiapan dari Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah ketika sewaktu-waktu terjadi bencana longsor dan banjir yang menghambat transportasi jalan harus segera diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

"Tidak boleh sampai sehari-hari, harus dalam waktu 1 x 24 jam harus itu selesai. Sehingga kalau kita bicara tentang logistik Pemilu kita itu harus sampai, jadi tidak terhambat, tidak terhenti," tandas Syahrul.

Contohnya di Riau, ungkap Syahrul, kerap terjadi banjir yang menyebabkan kendaraan truk atau mobil pribadi tidak bisa melewati jalan.

"Nah ini harus diantisipasi, jadi di pihak Kementerian PUPR sudah siap siaga, Memang titik-titik longsor, titik-titik banjir itu kan sudah terbaca dari awal, kemudian dari Kemenhub agar menertibkan perhubungan, kepolisian dan dinas terkait di daerah juga harus siap kesiapannya," pungkasnya.



"Di bulan-bulan ini dan satu bulan ke depan, sesuai dengan perkiraan dari BMKG mengatakan bahwa curah hujan sangat besar dan ini akan tentu mengakibatkan banyak bencana, baik itu bencana banjir, bencana longsor dan ada efeknya pada terhambatnya transportasi. Oleh karena itu, kita berharap karena kita akan menghadapi Pemilu, memastikan bahwasanya Pemerintah harus siap dengan mitigasi

**Dr. H. SYAHRUL  
AIDI MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Komisi V DPR RI





## Cegah Kecelakaan di Perlintasan KA, Amin Ak Desak Pemerintah Perbanyak Underpass

Jakarta (16/01) — Kecelakaan di pelintasan kereta api sebidang kembali terjadi. Hal itu menunjukkan faktor keselamatan masih menjadi persoalan serius.

Merujuk data PT Kereta Api Indonesia (KAI), antara tahun 2018 hingga 2023, terjadi 1.934 kecelakaan di pelintasan sebidang, dengan total korban mencapai 1.409 orang.

Dari jumlah tersebut, 502 orang meninggal dunia, 458 mengalami luka berat, dan 449 mengalami luka ringan.

Untuk mengurangi angka kecelakaan, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah untuk memperbanyak underpass atau jalan layang di pelintasan sebidang yang strategis dan padat lalu lintas, serta menutup pelintasan sebidang untuk jalan yang arus lalu lintasnya tidak terlalu padat.

"Karena sesuai UU, jalur kereta api merupakan jalur prioritas dan tidak boleh terganggu oleh lalu lintas moda transportasi lain," ujarnya.

Data dari buku Perkeretaapian dalam Angka 2022 menunjukkan penurunan jumlah pelintasan sebidang di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dari 5.829 pada 2017 menjadi 4.194 pada 2022. Dalam kurun lima tahun tersebut, sebanyak 1.635

pelintasan sebidang ditutup oleh KAI.

Selain itu, Amin juga meminta PT KAI untuk meningkatkan pelibatan pemerintah daerah agar mereka menambah petugas penjaga pelintasan.

Kasus kecelakaan terakhir di Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan keterangan saksi mata, saat itu pelintasan sebidang tidak ada yang menjaga.

"Jumlah personel penjaga pelintasan tidak mencukupi. Pada tahun 2022, masih terdapat 1.617 pelintasan resmi yang belum dijaga," ujarnya.

Langkah lain yang juga

tidak kalah pentingnya, imbuhnya, PT KAI harus meningkatkan kampanye penyadaran masyarakat, terutama pengguna kendaraan bermotor.

"Kesadaran dan disiplin dalam mengikuti aturan lalu lintas di pelintasan sebidang sangat diperlukan," tegasnya.

Kecelakaan yang masih terjadi, termasuk peristiwa terakhir, menunjukkan bahwa kesadaran pengendara terhadap risiko kecelakaan di pelintasan masih rendah.

"Dari berbagai kejadian, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan di pelintasan sebidang dapat dihindari dengan kesadaran, kedisiplinan, dan kebiasaan baik pengendara, terutama dalam mengikuti aturan lalu lintas dan mematuhi tanda-tanda keselamatan yang ada," tutup Amin.

"Dari berbagai kejadian, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan di pelintasan sebidang dapat dihindari dengan kesadaran, kedisiplinan, dan kebiasaan baik pengendara, terutama dalam mengikuti aturan lalu lintas dan mematuhi tanda-tanda keselamatan yang ada,

**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI



# Soroti KEK Sanur, Nevi Zuairina Minta Ada Transformasi Kesehatan dan Pariwisata

Jakarta (27/01) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Bali tengah menyongsong fase baru dalam perkembangan sektor kesehatan dan pariwisata Indonesia.

Menurutnya, proyek besar ini dipimpin oleh PT Pertamina Bina Medika-Indonesia Healthcare Corporation (IHC), Holding RS BUMN, yang menggagas pembangunan Bali International Hospital (BIH), sebuah rumah sakit bertaraf internasional mesti dapat mengkomodifikasi kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Anggota FPKS ini meminta agar kolaborasi strategis dengan Mayo Clinic, lembaga kesehatan ternama dari Amerika, menjadikan BIH sebagai titik fokus dalam pemberian pelayanan kesehatan berkualitas tinggi. Tujuan utamanya adalah

untuk melayani kebutuhan medis turis domestik dan asing yang berlibur di Bali.

"Saya menekankan pentingnya proyek ini dalam memajukan industri kesehatan Indonesia. Kami di Komisi VI mendorong agar Kementerian BUMN melalui IHC berkomitmen untuk menghadirkan standar layanan kesehatan kelas dunia di Indonesia, khususnya di Bali, yang merupakan destinasi pariwisata global," ujarnya dalam kesempatan rapat dengan Kementerian BUMN.

Anggota Badan Anggaran ini menyampaikan, bahwa BIH mesti dirancang dengan

teknologi medis tercanggih dan memiliki pusat keunggulan di berbagai bidang, termasuk Cardiology, Oncology, Neurology, Gastroenterology, dan Orthopedics. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan pusat Medical Check Up dan diagnostic center yang lengkap.

"Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah sakit, tetapi juga pengembangan area sekitar. Kawasan Ekonomi Khusus Sanur akan dikembangkan menjadi destinasi kesehatan dan pariwisata kelas dunia, dilengkapi dengan hotel, resort, ethnobotanical garden, dan convention center," jelas Nevi.

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat ini menambahkan, bahwa dengan pembangunan KEK Kesehatan Sanur, diharapkan terjadi pergeseran tren kunjungan warga Indonesia untuk berobat ke luar negeri menjadi lebih memilih Bali. Ini tidak hanya akan menghemat devisa, tetapi juga meningkatkan daya tarik Bali sebagai destinasi turis.

Namun, lanjut Nevi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah persiapan sumber daya manusia yang berkualitas, baik tenaga medis maupun non-medis, untuk mengoperasikan fasilitas ini. Kerja sama dengan institusi kesehatan internasional menuntut standar yang tinggi dalam pelayanan dan operasional.



"Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan rumah sakit, tetapi juga pengembangan area sekitar. Kawasan Ekonomi Khusus Sanur akan dikembangkan menjadi destinasi kesehatan dan pariwisata kelas dunia, dilengkapi dengan hotel, resort, ethnobotanical garden, dan convention center,"

**Hj. NEVI ZUAIRINA**

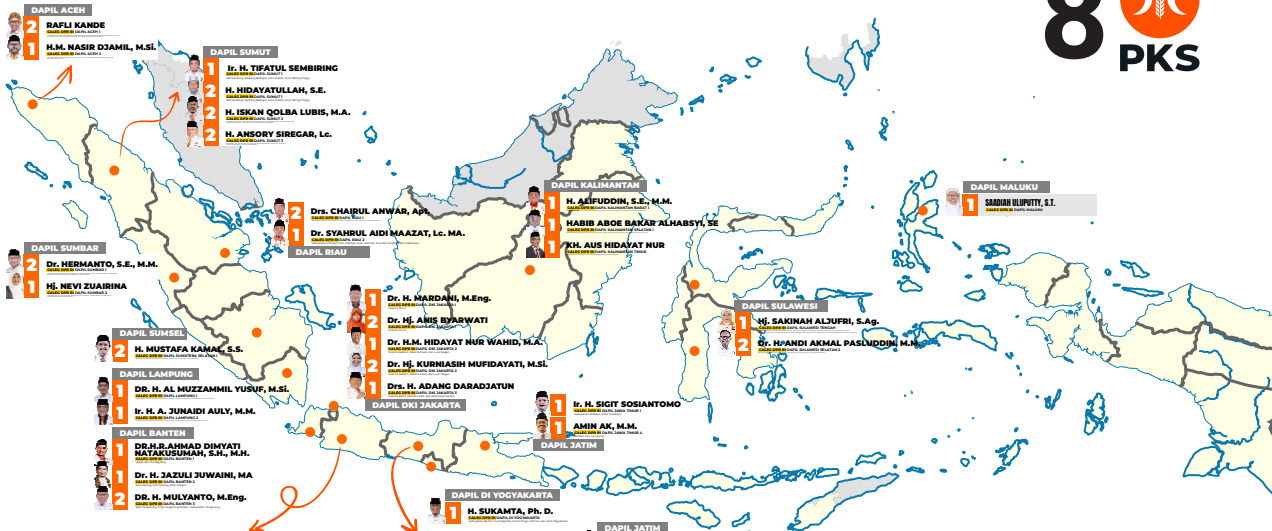
Anggota Komisi VI DPR RI

Pertanyaan juga muncul dari politisi perempuan PKS ini mengenai infrastruktur pendukung lainnya, seperti tempat peribadatan dan sistem pengamanan, terutama dari bencana alam seperti tsunami, mengingat lokasi KEK yang berdekatan dengan pantai.

Selain itu, lanjutnya, terdapat tantangan dalam

memastikan ketersediaan listrik yang stabil, mengingat kebutuhan listrik di Bali yang selama ini bergantung pada suplai dari Pulau Jawa. Ini menjadi aspek kritis dalam kelancaran operasional KEK Sanur.

Selengkapnya kunjungi [fraksidpar.pks.id](https://fraksidpar.pks.id)



**DAPIL ACEH**

**2** **RAFLI KANDE**  
**1** **H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

**DAPIL SUMUT**

**2** **Ir. M. TIFATUL SEMBRING**  
**2** **H. HIDAYATULLAH, S.E.**  
**2** **H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**  
**2** **H. ANSORY SIREGAR, Lc.**

**DAPIL KALIMANTAN**

**1** **H. AKFUDDIN, S.E., M.M.**  
**1** **HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, SE**  
**1** **KH. AUS HIDAYAT NUR**

**DAPIL MALUKU**

**1** **SADIKH ULUPUTTI, S.T.**

**DAPIL SUMBAR**

**2** **Dr. HERMANTO, S.E., M.M.**  
**1** **H. NEVI ZUAIRINA**

**DAPIL RIAU**

**2** **Drs. CHAIRUL ANHAR, Apt**  
**2** **Dr. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc. MA.**

**DAPIL SUMSEL**

**2** **H. MUSTAFA KAMAL, S.S.**

**DAPIL LAMPUNG**

**1** **DR. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.**  
**1** **Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

**DAPIL BANTEN**

**1** **DR.H.R.AHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.**  
**1** **Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
**1** **DR. H. HULYANTO, M.Eng.**

**DAPIL DKI JAKARTA**

**1** **Dr. H. MARDANI, M.Eng.**  
**1** **Dr. H. AMIS BYARWATI**  
**1** **Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**  
**1** **Dr. H. KURNIASH MUFIDAYATI, M.Si.**  
**1** **Drs. H. ADANG DARADZATUN**

**DAPIL JATIM**

**1** **Ir. H. SICIT SOSIANTOMO**  
**1** **AMIN AK, M.M.**

**DAPIL DI YOGYAKARTA**

**1** **H. SUKAMTA, Ph. D.**

**DAPIL JATIM**

**1** **H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**  
**2** **H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.**

**DAPIL JABARA**

**1** **H. LEDIA HANIFA AMALIAH, M.PsI.t.**  
**4** **TEDDY SETIADI, S.Sos**  
**2** **DipI. Ing. H. DIAN NURWITASARI, M.I.Pol.**  
**2** **H. ECKY AWAL MUXCHARAM**  
**2** **dRr. SLAMET**  
**2** **DR. H. FANMI ALAYDROES, M.M.Med.**  
**2** **H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S. Sos.**  
**3** **H. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.**  
**1** **H. AHMAD SYAIKHU**  
**1** **Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si.**  
**1** **H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I**  
**1** **DR. KH. SURAHMAN HIDAYAT, MA.**  
**2** **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

**DAPIL JATENG**

**2** **H. WISNU WIDAYA, A.P**  
**2** **Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**  
**1** **DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**  
**1** **ROFIK HANANTO, S.E.**  
**1** **DR. H. ABDUL FIKRI FAQH. M.M**

**(C) ALEG  
 PKS  
 DPR RI**



## Tungku Smelter Meledak Lagi, Rofik: Alarm Bahaya Program Hilirisasi Nikel Pemerintah

Jakarta (20/01) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menyayangkan terjadinya insiden tungku smelter meledak kembali di PT Sulawesi Mining Investment (SMI) serta menyampaikan belasungkawa atas dua tenaga kerja yang menjadi korbannya.

Meledaknya tungku smelter menjadi insiden ketiga bagi PT SMI. Menurut data LSM Trend Asia, dua insiden sebelumnya di PT SMI terjadi dari tahun 2017 dan 2018.

Rofik mengatakan insiden ini menambah catatan buruk bagi program hilirisasi yang selama ini dipromosikan Pemerintahan Jokowi. Sepanjang tahun 2023 sendiri, sudah terdapat 20 kali kecelakaan terkait industri smelter.

"Kejadian meledaknya smelter PT SMI ini juga sangat ironis karena terjadi pada saat Pemerintah masih belum usai dalam menyelidiki insiden ledakan smelter yang terjadi di pabrik PT ITSS dengan korban jiwa sebanyak 19 orang," tutur Aleg DPR RI Fraksi PKS tersebut.

Sebelumnya, pada 24 Desember 2023 lalu tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) meledak. PT ITSS ini juga beroperasi di kompleks industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, di

mana PT SMI berada.

Rofik mengutip pernyataan Menkomarves dimana Luhut menyampaikan akan tegas terhadap insiden yang terjadi di PT ITSS ini, bahkan sampai ke sanksi pidana apabila memang terbukti.

"Sayangnya, belum usai penyelidikan dan tindakan tegas terhadap PT ITSS, kejadian naas ledakan smelter PT SMI ini terjadi," imbuh Aleg DPR RI Dapil Jateng VII tersebut.

Rofik meminta pemerintah

bertindak cepat dan tepat dalam menyelidiki insiden PT SMI ini serta mengambil tindakan hukum yang tegas. Menurutnya, pemerintah harus serius karena insiden ini sudah menimbulkan banyak korban jiwa khususnya pekerja lokal.

"Rentetan kecelakaan yang terjadi ini merupakan alarm bahaya yang terang benderang bahwa banyak yang tidak beres dengan program hilirisasi ini," tegas politisi asli Purbalingga tersebut.

Rofik mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang program hilirisasi nikel yang sementara ini lebih banyak mudarat dari manfaatnya.

"Masyarakat berupa banyak dirugikan berupa nilai tambah yang kecil, terjadinya kecelakaan dan korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup dan juga cadangan nikel terus menipis," terang Rofik.

“Kejadian meledaknya smelter PT SMI ini juga sangat ironis karena terjadi pada saat Pemerintah masih belum usai dalam menyelidiki insiden ledakan smelter yang terjadi di pabrik PT ITSS dengan korban jiwa sebanyak 19 orang,”

**H. ROFIK HANANTO, S.E**

Anggota Komisi VII DPR RI



## Respon Ide Prabowo yang Potong Subsidi Gas LPG dan BBM, Mulyanto: Berbahaya!

Jakarta (12/01) — Politisi PKS Mulyanto mengkritik janji kampanye Capres Prabowo Subianto untuk memotong dana subsidi BBM dan gas LPG 3 kilogram.

Rencana itu dilakukan untuk menjaga stabilitas APBN yang sebagian besar dana tersedot untuk bayar utang dan bunga utang.

Menurut Mulyanto

“Jangan rakyat kecil yang dikorbankan untuk sekedar efisiensi APBN. Karena masih banyak alternatif lain yang dapat diambil sebelum memutuskan memotong anggaran subsidi bagi rakyat,”

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

gagasan ini berbahaya karena dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat kecil pada barang kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan harga yang disubsidi sekarang saja banyak masyarakat yang merasa berat, apalagi nanti bila ide pemotongan anggaran subsidi benar-benar dilaksanakan.

“Jangan rakyat kecil yang dikorbankan untuk sekedar efisiensi APBN. Karena masih banyak alternatif lain yang dapat diambil sebelum memutuskan memotong anggaran subsidi bagi rakyat,” kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan dalam kondisi seperti sekarang Pemerintah justru harusnya menata ulang mekanisme dan distribusi gas melon 3 kilogram dan BBM bersubsidi secara tepat sasaran melalui pendataan, digitalisasi dan pengawasan.

Dengan cara itu maka subsidi bagi rakyat akan lebih tepat sasaran.

“Penyimpangan BBM bersubsidi ke perkebunan besar dan industri jangan dibiarkan, apalagi ditengarai banyak dibeking aparat,” ujar Mulyanto.

Selain itu, kata Mulyanto, Pemerintah harus mengupayakan substitusi LPG 3 kilogram bersubsidi melalui program jargas rumah tangga; kompor listrik; termasuk DME (dimethyl eter). Bila kebijakan ini ditingkatkan dan dipercepat maka anggaran subsidi energi bisa turun.

“Yang ada sekarang malah anggarannya dipotong. Ini kan aneh, target 4 juta sambungan RT malah diturunkan hanya jadi 2 juta SR dan anggaran APBN untuk merealisasikannya dipotong terus. Ini soal konsistensi dalam menjalankan program prioritas,” tandas Mulyanto.





## Bansos Dipersonifikasi, Surahman Ajak Masyarakat Awasi karena Rawan Dipolitisasi

Jakarta (16/01) — Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS Surahman Hidayat, menyoroti isu terkait fenomena kontroversi statement yang disampaikan oleh oknum petinggi partai,

dalam moment pidatonya (26/02/2023) terkait personifikasi bansos.

Anggota Komisi VIII ini mengoreksi statement tersebut dengan menyampaikan bahwa bansos merupakan bantuan sosial dari negara

“Moment kampanye pemilihan umum ini bansos sangat rawan potensi dipolitisasi, bansos rawan di tunggangi muatan politik dengan ditafsirkan sebagai bantuan personal untuk memenangkan paslon tertentu, padahal bansos adalah program wajib pemerintah untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya”

**Dr. KH SURAHMAN  
HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

untuk masyarakat dan dibeli menggunakan uang rakyat.

“Bansos itu bantuan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat, dan dana pembeliannya menggunakan uang hasil pembayaran pajak dari masyarakat juga, artinya bansos itu dibeli menggunakan uang rakyat bukan dari kantong pribadi pemerintah” ujarnya.

Surahman juga mengungkapkan bahwa di moment-moment politik ini bansos sangat rawan dimanfaatkan elit politik penguasa saat kampanye untuk menguntungkan paslon tertentu di pemilihan umum.

“Moment kampanye pemilihan umum ini bansos sangat rawan potensi dipolitisasi, bansos rawan di tunggangi muatan politik dengan ditafsirkan sebagai

bantuan personal untuk memenangkan paslon tertentu, padahal bansos adalah program wajib pemerintah untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya” ungkapnya.

Diakhir, Surahman menyampaikan bahwa tidak etis mengklaim bansos sebagai bantuan personal elit penguasa. Ia juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos agar tidak terjadi penyalahgunaan penyaluran bansos untuk kepentingan politik.

“Kita semua perlu melakukan pengawasan bersama dalam program penyaluran bansos itu sendiri, untuk memastikan bahwa pemilu ini dapat berjalan dengan fair dan berintegritas” tutupnya.



## HNW: KPU Harus Persiapkan Pencoblosan Pemilu Presiden Putaran Kedua di Tanah Suci Bagi Jamaah Haji Indonesia

Jakarta (19/01) -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan danantisipasi pencoblosan Pemilihan Umum Presiden (Pemilu Presiden) putaran kedua di tanah suci.

Hal ini menyusul kemungkinan Pemilu Presiden akan berlangsung hingga putaran kedua yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Pada tahun 2024 jumlah jemaah haji Indonesia diperkirakan mencapai 240.000 orang "KPU harus mempersiapkan bagaimana kedaulatan rakyat, termasuk kedaulatan dari para jemaah haji yang jumlahnya 240 ribu tidak hilang," kata Hidayat dalam keterangan persnya, Rabu (17/1).

Hidayat mengatakan, KPU sebelumnya menyatakan bahwa jemaah haji yang akan mencoblos dalam Pemilu Presiden putaran kedua harus sudah terdaftar di tempat semula. Namun, Hidayat menilai hal ini tidak adil bagi jemaah haji yang berangkat setelah pendaftaran Pemilu Presiden putaran pertama dibuka.

"Kalau mereka kemudian para jemaah haji itu nanti ketika pemilihan umum presiden pada putaran pertama

masih ada di Indonesia, karena itu masih di bulan Februari, tapi kalau nanti putaran kedua mereka sudah berada di tanah suci," kata Hidayat.

Oleh karena itu, Hidayat meminta KPU untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jeddah untuk mempersiapkan pencoblosan Pemilu Presiden putaran kedua di tanah suci.

KPU juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pencoblosan.

"KPU harus mempersiapkan segalanya karena KPU ditugaskan untuk melaksanakan Pemilu yang sukses yaitu pemilu yang memaksimalkan peran serta dari rakyat pemilik kedaulatan termasuk jemaah haji," kata Hidayat.

Hidayat mengingatkan bahwa pencoblosan Pemilu Presiden putaran kedua akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Oleh karena itu, KPU harus segera mempersiapkan segala sesuatunya agar hak suara jemaah haji dapat terpenuhi.

"KPU harus mempersiapkan segalanya karena KPU ditugaskan untuk melaksanakan Pemilu yang sukses yaitu pemilu yang memaksimalkan peran serta dari rakyat pemilik kedaulatan termasuk jemaah haji,"

**Dr. H.M. HIDAYAT  
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Dukung Alih Status Jadi PPPK,

## Wisnu Wijaya Beri Pelatihan CAT bagi SDM PKH

Semarang (26/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya menggelar pelatihan Computer Assisted Test (CAT) untuk 125 SDM PKH dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Sosial RI.

Menggendeng lembaga pelatihan profesional Reforma Bina Potensia, Wisnu mengadakan pelatihan tersebut secara daring tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Wisnu mengatakan, pelatihan CAT ini menyasar SDM PKH dari Jateng 1 yang meliputi Kota dan Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Salatiga.

Wisnu menyebut tujuan dari pelatihan ini adalah menyiapkan para SDM PKH agar matang secara mental dan pengetahuan dalam mengerjakan soal ujian PPPK.

“Untuk diketahui, kami telah menerima kurang lebih

sebanyak 765 pendaftar yang masuk di dalam data base kami. Meskipun kami belum bisa meng-cover semuanya dan kami yakin bahwa semua pendaftar ini bisa jadi bukan berasal dari dapil Jateng 1 saja, akan tetapi ini menunjukkan bahwa antusiasme para SDM PKH terhadap pelatihan ini sangat tinggi dan kami sangat mengapresiasi hal itu,” ungkap Wisnu saat membuka acara, Rabu (24/01/2024).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini mengungkapkan pelatihan CAT ini adalah wujud keseriusan pihaknya untuk mendorong semua SDM PKH di dapilnya agar segera beralih

status menjadi PPPK lewat seleksi yang sah oleh pemerintah.

“Proses ini memang tidak mudah, namun kami ingin menyampaikan pesan kepada rekan-rekan kami SDM PKH, bahwa kami bersama mereka dalam melalui proses dan perjuangan ini. Kami siap membantu rekan-rekan kami agar bisa sukses menjadi PPPK sehingga bisa memperoleh nasib yang lebih layak,” jelas Wisnu.

Wisnu mengaku pihaknya banyak mendengar testimoni dari para KPM yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran dan kinerja SDM PKH dalam memfasilitasi, membina, dan mengadvokasi segala kebutuhan mereka.

“Sehingga mereka bisa betul-betul merasakan manfaat atas kehadiran Negara di tengah-tengah mereka melalui program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Komisi VIII DPR RI,” tuturnya.

Sebagai ujung tombak program Kementerian Sosial, Wisnu berharap tingginya beban kerja para SDM PKH dapat dibarengi dengan apresiasi yang sepadan.

“Apa yang mereka kerjakan tidak hanya berkaitan soal PKH semata, tetapi mereka juga mengurus bansos bedah rumah RST, BPNT, serta bansos lain yang secara nomenklatur berada di luar tupoksi mereka. Sebagai wujud apresiasi,



“Perjuangan untuk menunaikan alih status PPPK bagi SDM PKH tidak bisa dilakukan dalam waktu satu sampai dua tahun saja. Perjuangan ini membutuhkan napas panjang, kewenangan yang tepat, dan rekam jejak nyata,

### H. WISNU WIJAYA, SE, MM.

Anggota Komisi VIII DPR RI

minimal iuran BPJS Kesehatan mereka ditanggung oleh negara, bukan iuran mandiri sebagaimana yang terjadi saat ini,” beber Wisnu.

Untuk itu, Wisnu menambahkan, diperlukan kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara Komisi VIII DPR dan SDM PKH dalam merealisasikan aspirasi terkait

alih status menjadi PPPK.

“Perjuangan untuk menunaikan alih status PPPK bagi SDM PKH tidak bisa dilakukan dalam waktu satu sampai dua tahun saja. Perjuangan ini membutuhkan napas panjang, kewenangan yang tepat, dan rekam jejak nyata,” tandasnya.



Marak Dugaan Intimidasi,

## Wisnu Wijaya Tegaskan Bansos PKH Tak Bisa Dicabut karena Beda Pilihan Politik!

Semarang (20/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya mengatakan pihaknya banyak memperoleh aduan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang menerima intimidasi dari sejumlah pihak yang mengancam akan mencabut bansos tersebut karena motif politik.

Selain dari KPM PKH, aduan serupa juga datang dari KPM bansos lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Wisnu menegaskan kewenangan pencabutan bansos PKH ada pada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Untuk itu, dia meminta agar para KPM PKH tidak perlu khawatir semisal mendapat ancaman yang dilontarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Mengacu pada Pasal 35 dan 36 Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos RI) No. 1 Tahun 2018 tentang PKH, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI adalah yang menetapkan sasaran, validasi, dan melakukan terminasi atau pemutusan bansos PKH. Jadi, kewenangan untuk mencabut bansos PKH mutlak oleh pusat,

bukan oleh yang lain,” tegasnya.

Anggota DPR RI Dapil Jateng I ini menambahkan, dalam penyelenggaraan PKH, Kementerian Sosial RI tidak bekerja sendiri.

Komisi VIII DPR RI selaku mitra Kementerian Sosial RI juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan program nasional tersebut melalui fungsi

anggaran dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap efektivitas dan akurasi penerima manfaat bansos, Komisi VIII DPR adalah satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan membatalkan penerima bansos serta memiliki akses langsung ke Menteri Sosial untuk menyampaikan evaluasi,” jelas Wisnu.

Wisnu menerangkan, PKH adalah program nasional yang ditetapkan oleh pusat yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Kota, serta sumber dana lain yang sah dan

**BERIKUTNYA >>>**

“Mengacu pada Pasal 35 dan 36 Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos RI) No. 1 Tahun 2018 tentang PKH, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI adalah yang menetapkan sasaran, validasi, dan melakukan terminasi atau pemutusan bansos PKH. Jadi, kewenangan untuk mencabut bansos PKH mutlak oleh pusat, bukan oleh yang lain,” tegasnya.



## Marak Dugaan Intimidasi, Wisnu Wijaya Tegaskan Bansos PKH Tak Bisa Dicabut karena Beda Pilihan Politik!

### « SEBELUMNYA

tidak mengikat. Hal tersebut membuat pemerintah daerah juga memiliki peran dan kewenangan atas penyelenggaraan PKH meskipun sifatnya terbatas.

“Walaupun tidak memiliki kewenangan untuk menghapus KPM, pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengusulkan kandidat penerima PKH kepada Kemensos RI melalui usulan berjenjang dengan memperhatikan hirarki kekuasaan. Selanjutnya, dari usulan tersebut akan ada validasi terlebih dulu oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI dengan

menerjukkan Pendamping PKH ke lapangan guna memeriksa apakah nama yang diusulkan layak atau tidak layak. Di akhir, penetapan layak atau tidaknya kandidat ada di tangan pemerintah pusat,” terang putra daerah Semarang ini.

Wakil rakyat dari Jateng I ini menambahkan, anggaran riil bansos PKH yang diterima langsung oleh KPM berasal dari dana APBD setelah mendapat

persetujuan dari Komisi VIII DPR. Sementara, dana yang diambil dari APBD Provinsi dan Kota/Kabupaten adalah anggaran penyertaan kegiatan PKH sebagai dukungan pelaksanaan PKH misalnya untuk fasilitas sosialisasi, pemantauan, dan bantuan percepatan pemberdayaan KPM PKH.

“Selain tergambar dari sumber pendanaan, besarnya kewenangan pusat atas PKH ini juga tergambar dari kewenangan yang dimiliki di antaranya penetapan kandidat penerima PKH, penghapusan KPM PKH, penetapan nilai bansos, besar manfaat, jumlah penerima, serta lokasi penyaluran bansos,” jelas Wisnu.

Terkait dengan mekanisme penanguhan dan penghentian bansos PKH, Legislator PKS ini menjelaskan, berdasarkan Pasal 7-9 Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH, sanksi berupa penanguhan atau penghentian bantuan sosial PKH hanya dikenakan kepada KPM apabila tidak memenuhi kewajiban.

Di antara kewajiban itu adalah pemeriksaan kesehatan pada fasilitas

pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun; mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat,” beger Wisnu.

Lebih lanjut, Wisnu mengatakan bahwa ketiga hal di atas bisa diketahui melalui mekanisme Verifikasi Komitmen oleh pendamping PKH setiap bulannya. Pendamping PKH melakukan pendampingan kepada para KPM sekaligus melakukan entry data Verifikasi Komitmen untuk mencatat kehadiran seluruh KPM pada setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

“Data hasil entri Verifikasi Komitmen oleh pendamping PKH dikirimkan ke Pusdatin Kemensos RI sebagai salah satu dasar penyaluran, penanguhan, dan penghentian bantuan,” tuturnya.

Jadi, demikian Wisnu menyimpulkan, sepanjang KPM PKH memang telah menaikan kewajibannya yang telah



“Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap efektivitas dan akurasi penerima manfaat bansos, Komisi VIII DPR adalah satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan membatalkan penerima bansos serta memiliki akses langsung ke Menteri Sosial untuk menyampaikan evaluasi,”

## H. WISNU WIJAYA, SE, MM.

Anggota Komisi VIII DPR RI

ditetapkan dalam aturan yang berlaku, maka tidak perlu khawatir bansosnya akan dicabut.

“Jenjang kepesertaan PKH maksimal sampai 5 tahun dan Kemensos RI telah, sedang dan akan terus mengupayakan para

penerima manfaat bisa graduasi tepat waktu. Dan kami, Komisi VIII DPR, berkomitmen melindungi para KPM semisal ada ancaman atau intimidasi oleh pihak lain,” tandas Wisnu yang pernah dinobatkan sebagai Tokoh Inspiratif Jateng 2023

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atrokratif Substantif*

**Parlementaria** ( Diskusi Publik,  
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,  
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



# Komisi IX FPKS Wanti-wanti Pemerintah untuk Pastikan KPPS Pemilu 2024 Terproteksi BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta (24/01) — Tingginya kasus sakit dan gugurnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 lalu diharapkan tidak terulang di Pemilu 14 Februari 2024 yang sebentar lagi akan tiba dalam hitungan hari.

Terkait hal itu, berbagai langkah antisipasi harus dilakukan sejak awal dengan mempersiapkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi segenap petugas KPPS.

Saat Pemilu 2019 lalu, tercatat 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas yang sakit saat bertugas.

Maka, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, Selasa (23/1/2024) menekankan kepada Pemerintah dan jajaran penyelenggara agar semua panitia pelaksana penyelenggara Pemilu sampai ke level TPS harus ada proteksi BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi sebenarnya ini sudah menjadi wacana kami di Komisi IX DPR RI untuk mengusulkan

agar semua panitia pelaksana penyelenggara Pemilu sampai ke level TPS ini harus ada proteksi. Kita harus belajar dari kasus 2019, begitu banyak panitia teman-teman KPPS yang gugur karena tidak tertolong karena kelelahan menghitungkan suara dan sebagainya," ujar Kurniasih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/01/2024).

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan, meski Pemilu 2024 saat ini telah dibantu dengan sistem digital (Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara) dan sebagainya, namun ia mewanti-wanti Pemerintah khususnya penyelenggara Pemilu harus mengantisipasi terjadinya KPPS yang meng-

alami sakit berkepanjangan ataupun sakit oleh karena kelelahan menghitungkan suara dan sebagainya.

"Kami tentu tidak berharap dan tidak berdoa ada korban jiwa gitu ya, tetapi harus diantisipasi. Dan satu-satunya perlindungan yang paling pas adalah memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada semua petugas sampai di level TPS. Dan skrining kesehatan yang dilakukan itu menjadi starting awal untuk bisa memberikan perlindungan terhadap semua panitia sampai ke level KPPS ataupun di level TPS," tandasnya.

Di sisi lain, terkait anggaran, Kurniasih mengungkapkan bahwasanya Komisi IX sudah sejak lama tepatnya pada saat sebelum pembahasan APBN 2024 mewacanakan hal tersebut.

"Masalahnya pemilihan KPPS ini kan berlangsungnya sangat mepet sekali ya, sehingga akan diberikan kepada siapa? Itu permasalahan yang pertama," tutur Legislator Dapil



Ketenagakerjaan kan harus ada pembayaran kan kepesertaannya ya, yang paling tepat ada di mana? ada di Kemendagri ataukah ada di KPU atau ada di mana? Nah ini harusnya sudah selesai,"

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Jakarta II ini.

Permasalahan kedua, sambungnya, adalah lembaga mana yang berhak menanggung anggaran dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

"Kan BPJS Ketenagakerjaan kan harus ada pembayaran kan kepesertaannya ya, yang paling tepat ada di mana? ada di Kemendagri ataukah ada di KPU atau ada di mana? Nah ini harusnya sudah selesai," tegasnya.

Oleh karena itu, Kurniasih menyayangkan Pemerintah yang seolah tidak belajar dari kasus 2019. "Harusnya kita belajar dari 2019 begitu banyak korban bahkan sampai korban jiwa yang harusnya tidak terulang lagi. Mudah-mudahan teman-teman di lapangan, panitia penyelenggara yang di-grassroot ini benar-benar bisa dijaga kesehatannya oleh Allah dan tidak ada yang sakit apalagi korban jiwa," pungkasnya



## Temuan KLB Polio, Netty Prasetiyani Desak Pemerintah Lakukan Vaksinasi Polio Sesuai Pedoman WHO

Jakarta (19/01) -- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, temuan kasus luar biasa (KLB) polio di beberapa daerah adalah tantangan baru sistem kesehatan Indonesia yang harus diperhatikan.

"Ini persoalan penting yang harus diperhatikan. Jangan karena sudah memegang sertifikat bebas polio sejak 2014, kita menjadi terlena dan tidak mawas diri. Salah satu indikatornya adalah penurunan cakupan imunisasi balita," kata Netty dalam keterangan mediana, Jumat, 19 Januari 2024.

Berdasarkan data Kemenkes, kata Netty, terjadi penurunan cakupan vaksin polio, baik OPV maupun IPV sejak 2 tahun terakhir. Pada tahun 2020, misalnya, cakupan vaksinasi OPV mencapai 86,8 persen, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 80,2 persen. Bahkan, beberapa daerah cakupan vaksinasinya kurang dari 50 persen sejak tahun 2020.

"Salah satu penyebabnya adalah imbas pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan imunisasi untuk anak dan balita terganggu. Apalagi kegiatan Posyandu sempat terhenti. Seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya

penurunan cakupan imunisasi," ujarnya.

Oleh sebab itu, Netty mendukung langkah Kemenkes RI yang menyelenggarakan imunisasi polio tambahan atau Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio (Sub PIN Polio). "Kegiatan PIN Polio harus disosialisasikan ke masyarakat agar efektif dan dapat mencegah munculnya kasus polio di masa depan."

Selain itu, politisi DPR RI dari dapil Cirebon-Indramayu ini

mendesak pemerintah untuk menerapkan vaksinasi polio sesuai dengan pedoman WHO.

"Pastikan vaksinasi polio dilakukan sesuai dengan pedoman WHO, yaitu, soal cakupannya yang harus di atas 95 persen," tambahnya.

Netty juga mendorong pemerintah mencegah disinformasi soal vaksinasi polio dengan menggandeng berbagai pihak.

"Jangan sampai masyarakat resisten terhadap vaksinasi akibat disinformasi. Libatkan berbagai stakeholder untuk mencegah menyebarnya hoax. Masyarakat harus dicerdaskan bahwa vaksinasi pada saat ini adalah upaya pencegahan penyakit yang telah teruji secara klinis dan ilmiah," tambahnya.

"Salah satu penyebabnya adalah imbas pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan imunisasi untuk anak dan balita terganggu. Apalagi kegiatan Posyandu sempat terhenti. Seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya penurunan cakupan imunisasi,"

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI





Ketimpangan Jumlah Lulusan S2 dan S3

## Aleg PKS: Perlu Desain Besar Pendidikan, Bukan Hanya Naikan Anggaran

Jakarta (16/01) -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut bahwa perbedaan yang jauh terkait jumlah lulusan S2 dan S3 antara Indonesia dengan Malaysia maupun Singapura dan Vietnam, telah lama terjadi.

Sehingga, seharusnya Pemerintah dalam merespons hal itu tidak cukup dengan menaikkan skema anggaran pendidikan. Tapi, juga perlu desain besar pendidikan seperti apa yang ingin dibangun.

"Sejak lama Komisi X sesungguhnya ketika Menteri (Mendikbudristek) ini dilantik lantas kita minta desain besar dari pendidikan itu ke depan mau apa? Mau ke vokasi kah atau ke akademik atau ke profesi?" ujar Fikri, Senin (16/01).

"Tentu kalau bicaranya sarjana berarti kan akademik. Nah kalau akademik, berarti nanti itu sarjana dan tidak (cukup hanya) sarjana tergantung orientasinya mau ke mana. Kalau ke vokasi kan bukan sarjana." Lanjutnya.

Maka dari itu, ia menilai peringatan dari Presiden RI Joko Widodo tersebut perlu ditanggapi secara serius dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama pendidikan tinggi.

Fikri menjelaskan bahwa anggaran pendidikan pada tahun 2024 telah naik sebesar Rp.17 triliun. Meski demikian, menurutnya perlu diperhatikan

apakah dialokasikan seluruhnya untuk pendidikan tinggi atau tidak.

"Sekali lagi, sentilan ini yang menurut saya mungkin agak terlambat. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak disadari segera, karena 2024 dan selanjutnya akan ganti kepemimpinan dan kita harus membangun dari SDM,"

pungkas Politisi Fraksi PKS ini. Diketahui, Presiden Jokowi

menyebutkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di angka 0,45 persen. Adapun negara tetangga, seperti Vietnam dan Malaysia, sudah di angka 2,43 persen, sedangkan pada negara maju 9,8 persen.

Presiden RI Joko Widodo menyebut upaya untuk menyusun rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 ini membutuhkan anggaran di tengah tekanan berat fiskal negara. Terlebih, SDM bisa menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan akan menjadi kunci. Oleh karena itu, dirinya meminta agar pembiayaan pendidikan dan riset harus terus diupayakan seoptimal mungkin.

Anggaran pendidikan pada tahun 2024 telah naik sebesar Rp.17 triliun. Meski demikian, menurutnya perlu diperhatikan apakah dialokasikan seluruhnya untuk pendidikan tinggi atau tidak. Sekali lagi, sentilan ini yang menurut saya mungkin agak terlambat. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak disadari segera, karena 2024 dan selanjutnya akan ganti kepemimpinan dan kita harus membangun dari SDM,"

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI



## Jelang Pilpres 2024, Fahmy Alaydroes: Ujaran Kebencian dan Kekerasan Verbal Capres Cemari Pesta Demokrasi

Jakarta (13/01) — Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sarat dengan ujaran kebencian dan kekerasan verbal. Fenomena ini sangat disayangkan,

karena calon pemimpin bangsa seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi etika dan adab.

Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes mengatakan, umpa-tan kasar bernada kebencian dengan mudah dilontarkan oleh satu capres kepada capres lain. Misalnya, 'goblok', 'tolol', 'endasmu etik', 'penghianat', 'tebal muka', 'pembohongan' dan sebagainya. Ucapan tersebut disampaikan di ruang terbuka, di tengah raturan para pendukung yang mengelu-elukan capres tersebut.

"Keteladanan seorang pemimpin itu sangat signifikan pengaruhnya untuk ditiru dan diikuti oleh pengikutnya. Kekerasan verbal yang dilakukan pemimpin pasti menjadi pembenaran, dan juga dorongan bagi para pengikutnya untuk melakukan hal yang

semisal," kata Fahmy.

Fahmy menilai, fenomena ini sangat berbahaya, karena dapat mendorong pengikutnya untuk bertindak yang lebih kasar, bahkan sampai kepada kekerasan fisik. Adanya ancaman pembunuhan kepada salah satu capres, bisa jadi sebagai buah dari rasa kebencian yang terus dipupuk melalui berbagai framing oleh capres dan pendukungnya.

"Alangkah baik dan bijaknya bila semua capres dan cawapres menunjukkan etika dan adab yang luhur, dan lebih fokus kepada adu gagasan, adu program untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sambil berupaya untuk menciptakan kondisi kesatuan dan persatuan bangsa. Masih ada waktu untuk memperbaiki," kata Fahmy.

Kekerasan verbal yang dilakukan pemimpin pasti menjadi pembenaran, dan juga dorongan bagi para pengikutnya untuk melakukan hal yang semisal,"

**Dr. H. FAHMY  
ALAYDROES, MM, M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI



**Daripada Korbankan Anggaran LPDP, Fahmy Tegaskan Alokasi untuk IKN Bisa Dialihkan untuk Dana Riset**

Jakarta (19/01) -- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes mempertanyakan munculnya wacana dari pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),

yang berencana menghentikan sementara alokasi anggaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurut Fahmy, rencana pemerintah ini perlu dikaji ulang sebelum benar-benar sah berlaku.

"Riset itu sangat penting, tapi jadi aneh kalau yang dikorbankan adalah dana LPDP yang justru sangat penting dan relevan untuk membiayai sarjana-sarjana kita agar memiliki kemampuan riset," ungkap Fahmy di Jakarta, Jumat (19/01/2024).

Politisi Fraksi PKS itu mengusulkan agar alokasi anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan alutsista dialihkan untuk alokasi riset dan pengembangan pendidikan dibandingkan menghentikan dan mengalihkan alokasi LPDP. Hal ini, baginya, bisa menjadi solusi yang efektif.

"Menghapus dana LPDP, sama saja dengan mengebiri anak-anak bangsa. Dana riset kita sangat kurang. (Maka) ambil dari alokasi anggaran pembangunan yang tidak atau

belum perlu, semisal proyek IKN atau efisiensi dana, seperti anggaran pembelian alutsista bekas, yang konon sangat boros dan kemahalan," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (16/1/2024) lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan akan

menghentikan sementara anggaran LPDP, yang mana alokasi anggarannya akan dialihkan untuk alokasi anggaran pendidikan lainnya.

Di mana anggaran tersebut akan dialihkan beberapa di antaranya untuk membiayai riset perguruan tinggi, perbaikan pendidikan vokasi, dan alokasi beasiswa lainnya.

Dirinya menyebutkan, saat ini anggaran LPDP telah mencapai Rp150 triliun. Angka tersebut, nilainya, sudah menumpuk. Ia menegaskan, meski alokasi anggaran LPDP akan dihentikan, program beasiswa LPDP tidak berhenti.

“Menghapus dana LPDP, sama saja dengan mengebiri anak-anak bangsa. Dana riset kita sangat kurang. (Maka) ambil dari alokasi anggaran pembangunan yang tidak atau belum perlu, semisal proyek IKN atau efisiensi dana, seperti anggaran pembelian alutsista bekas, yang konon sangat boros dan kemahalan,”

**Dr. H. FAHMY  
ALAYDROES, MM, M.Ed**  
Anggota Komisi X DPR RI

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atakrif Substantif*



Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada generasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.





## Terancam Gagal Tanam, Johan Dorong Pemerintah Beri Jaminan Petani Hadapi Cuaca Ekstrem

Jakarta (16/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mengharapkan DPR beserta Pemerintah mampu memberikan jaminan bagi petani dalam menghadapi ancaman gagal tanam

Hal ini disampaikan Johan dalam interupsinya di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III 2023/2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (16/01).

Johan mengungkap bagaimana DPR dan Pemerintah selalu membahas faktor El Nino dan cuaca ekstrem pada tiap pembicaraan APBN. Johan mengharapkan ada realisasi bahasa tersebut pada situasi yang dihadapi para petani saat ini.

"Hari ini hal itu kejadian. Kita semua baru selesai reses, terutama di Dapil saya di sepanjang Pulau Sumbawa itu para petani kita sedang dalam masa

kekhawatiran yang begitu tinggi akibat gagal tanam." ujar Anggota F-PKS Dapil NTB I tersebut.

Johan berharap, Negara dapat hadir melalui DPR, Badan Anggaran (Banggar), serta koordinasi dengan pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap petani yang hari ini terancam gagal tanam di musim tanam pertama.

"Karena itu pimpinan, saya berharap sekali lagi agar mengkoordinasikan hal ini dan sekali lagi berikan kepastian kepada masyarakat. Agar masyarakat petani kita kemudian bisa tenang dan bisa menghadapi pemilu ini dengan riang gembira." tutup Johan.

"Hari ini hal itu kejadian. Kita semua baru selesai reses, terutama di Dapil saya di sepanjang Pulau Sumbawa itu para petani kita sedang dalam masa kekhawatiran yang begitu tinggi akibat gagal tanam. Karena itu saya berharap sekali lagi agar mengkoordinasikan hal ini dan sekali lagi berikan kepastian kepada masyarakat"

**H. JOHAN ROSIHAN, S.T**

Anggota Komisi IV DPR RI



## Sukamta Dorong DPR dan Pemerintah Konsisten Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Jakarta (16/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menegaskan bahwa bangsa Indonesia, terutama DPR dan Pemerintah harus terus konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal ini disampaikan Sukamta dalam interupsinya di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III 2023/2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (16/01).

"Hari ini memasuki hari ke-

"Hari ini memasuki hari ke-100 invasi Israel ke Gaza Palestina. Yang terjadi adalah upaya genosida, penghapusan bangsa Palestina dari wilayah Palestina. Pemboman tanpa pembedaan wanita, anak, orang tua, orang sakit, dan difabel, dilakukan membabi buta dengan korban hingga 30 ribu orang baik meninggal dan hilang tidak ditemukan jasadnya

### H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

100 invasi Israel ke Gaza Palestina. Yang terjadi adalah upaya genosida, penghapusan bangsa Palestina dari wilayah Palestina. Pemboman tanpa pembedaan wanita, anak, orang tua, orang sakit, dan difabel, dilakukan membabi buta dengan korban hingga 30 ribu orang baik meninggal dan hilang tidak ditemukan jasadnya," ujar Sukamta.

Wakil Ketua BKSAP tersebut menyebut, misi Israel menghancurkan Palestina dengan segala superioritas militer dan sumber dayanya ternyata kalah oleh perlawanan rakyat Palestina. Israel dianggap gagal dalam perang darat dan hanya bisa menyerang melalui pemboman jalur udara.

Meski begitu, Sukamta

menegaskan bahwa kematian dan pembantaian masih terus berlangsung, la juga berharap seluruh bangsa Indonesia termasuk DPR dan Pemerintah konsisten membantu rakyat dan mendukung kemerdekaan Palestina.

"Saya berharap Pimpinan DPR, Kita sebagai institusi perwakilan ini bisa mengeluarkan sebuah surat untuk diedarkan kepada seluruh kedutaan asing yang ada di Jakarta untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina agar merdeka, dan juga untuk menghentikan genosida oleh Israel. Kalau pimpinan DPR setuju dan kita dapat melakukan itu, ini dapat menjadi preseden yang luar biasa bagi DPR." pungkas Sukamta.

# JAKARTA

Kota Dengan Kuliner Terbaik  
Kedua di ASEAN

JAKARTA  
*(tetap)*  
IBUKOTA  
NEGARA



Laksa Betawi

Asinan Betawi



Soto Betawi



## Jakarta

berhasil masuk

urutan ke-**11**  
terbaik dunia dan

ke-**2** terbaik se-ASEAN  
sebagai kota yang  
memiliki kuliner  
terbaik versi  
TasteAtlas



INFOGRAFIS  
FPKS DPR RI


World  
Rank.

10.  **1** ★ 4.66  
Bandung

11.  **2** ★ 4.65  
Jakarta

16.  **3** ★ 4.61  
Surabaya

18.  **4** ★ 4.60  
Bangkok

27.  **5** ★ 4.56  
Singapura

## Kuliner Jakarta

mendapatkan

**rating 4,65**

dan berada  
satu poin  
di bawah  
kota Bandung



## Syahrul Aidi Apresiasi Dukungan Kemenlu pada Afrika Selatan; Bawa Genosida Israel ke Mahkamah Internasional

Jakarta (16/01) — Anggota DPR sekaligus Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Palestina DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengapresiasi Kementerian luar negeri yang mendukung Afrika Selatan membawa Israel ke Mahkamah internasional, untuk dijadikan sebagai penjahat perang.

"Kami mengapresiasi Kementerian Luar Negeri atas dukungannya kepada Afrika Selatan yang membawa Israel ke Mahkamah Internasional. Selain itu, dalam Konferensi Parlemen OKI (Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam), 10 Januari kemarin kita telah memberi catatan, bahwa menghimbau kepada negara-negara OKI untuk menyampingkan Israel dalam segala keikutsertaan dalam lembaga-lembaga internasional," papar Syahrul dalam sidang Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, di ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/01).

Tidak hanya itu, ditambahkannya, Politisi dari Fraksi PKS ini juga kembali mengingatkan kepada internasional, bahwa Indonesia sebagai negara yang menolak penjajahan, dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Bahkan, pihaknya selalu memberikan dukungan, dan

memberikan catatan agar menghapus lembaga atau organisasi perjuangan Palestina itu. dalam daftar organisasi teroris yang dibuat oleh beberapa negara.

"Mudah-mudahan baik itu lembaga legislatif, Parlemen agar selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina dan memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Selain itu pihaknya meminta agar pemerintah juga meningkatkan peran aktifnya untuk memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," tambahnya.

Politisi dari Daerah

Pemilihan (Dapil) Riau II ini juga berharap, tidak hanya sampai menteri luar negeri saja, melainkan juga Presiden sebagai paling diplomasi Indonesia, agar bisa menyuarakan ini di tingkat global ke internasional.

"Mudah-mudahan rakyat Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya," pungkasnya.

Sebagaimana yang diketahui, tanggal 11-12 Januari 2024 kemarin, Afrika Selatan telah melaporkan dan membawa bangsa Israel ke Mahkamah Internasional atas genosida yang dilakukan kepada bangsa Palestina. Hal ini sangat penting, sebagai langkah awal yang legal untuk mulai mentracking kejahatan internasional dan hukum internasional kepada bangsa Palestine. Bahkan dalam pengadilan tinggi PBB tersebut Afrika selatan juga akan memaksa Israel menghentikan operasi militernya di Gaza.

"Mudah-mudahan baik itu lembaga legislatif, Parlemen agar selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina dan memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina.

**Dr. H. SYAHRUL AIDI  
MAAZAT, Lc., M.A.**

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI





## Wakil Ketua BKSAP FPKS Dukung Aksi Walkout Menlu Retno Menentang Israel di DK PBB

Jakarta (27/01) -- Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta mengapresiasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang melakukan walk out saat Dubes Israel memberikan pernyataan pada Sidang Dewan Keamanan (DK) PBB di New York.

Hal ini, kata Sukamta, merupakan respon atas pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu bahwa Israel tidak akan membiarkan negara Palestina berdiri.

Menurut Menlu Retno, pernyataan Netanyahu ini berbahaya, sekaligus mengonfirmasi tujuan Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia. Karena itu, Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan sampai kembalinya keadilan dan martabat bangsa Palestina.

Wakil Ketua Badan Kerja-sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI ini menyatakan pihaknya turut mengapresiasi komitmen dan konsistensi Menlu dalam membela bangsa Palestina.

"Kami mengapresiasi dan mendukung konsistensi Bu Menlu atas konsistensi sikap Kemenlu untuk perjuangan memerdekakan Palestina secara penuh. Tindakan Israel menjajah dan melakukan genosida terhadap Palestina memang di luar nalar, extraordinary, maka harus kita sikapi dan kita lawan dengan cara-cara yang tak biasa, dengan

cara-cara yang juga extraordinary," tegas Sukamta.

Sukamta yang juga sebagai Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini menambahkan bahwa kita perlu terobosan-terobosan untuk memerdekakan Palestina secara penuh.

"Puluhan resolusi PBB pun telah gagal menghentikan tindakan kekejaman Israel atas Palestina. Cara-cara yang bisa ditempuh dalam lingkup diplomasi di antaranya mengucilkan Israel di dunia

Internasional," ungkapnya.

Boikot, divestasi dan sanksi (BDS), imbuhnya, harus terus digaungkan dan dilakukan secara massif dan kompak oleh semua negara.

"Israel itu hanya numpang di wilayah Palestina. Mereka hanya berilindung di balik ketiak negara-negara besar yang mendukung. Israel tidak sekuat yang diduga. Buktinya, Hamas dengan persenjataan yang tidak lebih canggih bisa memporak-porandakan mereka. Secara diplomasi, Indonesia tetap harus melakukan langkah dan ide-ide kreatif serta lobi secara ketat kepada negara-negara yang masih mendukung dan melindungi Israel agar mereka dengan tegas menghentikan tindakan brutal dan kejam Israel atas Palestina," tegas Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini.

"Kami mengapresiasi dan mendukung konsistensi Bu Menlu atas konsistensi sikap Kemenlu untuk perjuangan memerdekakan Palestina secara penuh. Tindakan Israel menjajah dan melakukan genosida terhadap Palestina memang di luar nalar, extraordinary, maka harus kita sikapi dan kita lawan dengan cara-cara yang tak biasa, dengan cara-cara yang juga extraordinary,

**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI



## Setujui 17 RUU Kabupaten/Kota, Aleg PKS: Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Daerah sesuai Karakter Wilayah!

Jakarta (18/01) --- Fraksi PKS DPR RI menyetujui 17 (tujuh belas) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Bintan, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah,

Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Hal ini disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI F-PKS, Ledia Hanifa Amaliah, dalam Rapat Pleno di Ruang Baleg, Senayan, Jakarta, Selasa (18/01/2024).

"Fraksi PKS sepakat pengaturan pada 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota tersebut menekankan pada penegasan alas hukum, batas wilayah, serta karakteristik wilayah, suku bangsa dan budaya," ujarnya

Anggota Komisi X ini berharap agar pengelolaan dan pengembangan potensi daerah mempertimbangkan karakteristik wilayah dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota tersebut.

"Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan harus memiliki prioritas pembangunan di

bidang kelautan dan perikanan. Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki karakteristik wilayah dataran rendah dan pegunungan yang memiliki tanah yang subur harus memprioritaskan pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan. Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki potensi sumber daya alam harus memprioritaskan pengelolaan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang berkelanjutan," ucapnya

Dalam penyampaian pendapat mewakili Fraksi PKS,

Ledia Hanifa berharap 17 (tujuh belas) RUU tentang Kabupaten/Kota tersebut tetap mempertimbangkan aspek kesejarahan, keberagaman masyarakat, baik keberagaman suku, agama, dan ras serta antar golongan.

Terakhir, Ledia pun meminta kepada pemerintah agar memastikan unsur pemerintah daerah menjunjung tinggi netralitas lembaga negara di Pemilu 2024.

"Fraksi PKS DPR RI meminta kepada pemerintah agar terus mengawal kinerja pemerintah daerah khususnya netralitas aparatur sipil di tengah-tengah pelaksanaan Pemilu 2024. Pastikan unsur-unsur pemerintah daerah menjunjung tinggi netralitas lembaga negara agar Pemilu 2024 berlangsung dengan damai, aman, dan tertib," pungkasnya

"Fraksi PKS DPR RI meminta kepada pemerintah agar terus mengawal kinerja pemerintah daerah khususnya netralitas aparatur sipil di tengah-tengah pelaksanaan Pemilu 2024. Pastikan unsur-unsur pemerintah daerah menjunjung tinggi netralitas lembaga negara agar Pemilu 2024 berlangsung dengan damai, aman, dan tertib,"

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Badan Legislasi DPR RI



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**



## Kebakaran Smelter di Dapilnya Kerap Terjadi, Sakinah Al-Jufri Mengaku Prihatin

Palu (26/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri, menyoroti sering terjadinya insiden tungku smelter yang terbakar atau meledak di Dapilnya.

Baru-baru ini, kata Sakinah, terjadi kembali kebakaran tungku smelter Sulawesi Mining Investment.

Sakinah mengatakan insiden ini menambah deretan goresan buruk bagi pemerintah

dalam mengelola industrialisasi nikel yang digembor-gemborkan di Morowali Sulawesi Tengah.

“Sudah berulang kali terjadi kebakaran dan meledak tungku smelter. Dari serangkaian insiden ini tidak sedikit jatuh korban dari para pekerja, juga dampak pencemaran lingkungannya” ungkap Sakinah, Kamis (25/01).

Politisi perempuan ini meminta pemerintah untuk bertindak cepat dan serius, karena insiden yang sering terulang ini banyak menimbulkan korban jiwa dari para pekerja dan berakibat pada pencemaran lingkungan.

“Insiden meledak, kebakaran yang beruntun ini seolah memberikan sinyal bahwa program hilirisasi nikel amburadul, Pemerintah tidak baik dalam mengelola

“Keselamatan pekerja menjadi prioritas utama dalam perusahaan, sehingga penerapan program K3 harus berjalan dan dipantau dengan sangat baik. Selain peralatan yang digunakan juga harus baik pula,”

**Hj. SAKINAH  
ALJUFRI, S.Ag**  
Anggota Komisi X DPR RI

industrialisasi nikel,” ungkap politisi perempuan PKS asal Sulawesi Tengah ini.

Lebih lanjut politisi PKS ini juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi penerapan program Kemanan dan Keselamatan Kerja pada semua perusahaan yang bergerak pada industri nikel.

“Keselamatan pekerja menjadi prioritas utama dalam perusahaan, sehingga penerapan program K3 harus berjalan dan dipantau dengan sangat baik. Selain peralatan yang digunakan juga harus baik pula,” tuturnya.

“Jangan sampai perusahaan lalai dan ugul-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri, mengeksploitasi secara ugul-ugalan dan merusak lingkungan,” pungkasnya.

# Wisnu Wijaya Terima Anugerah Tokoh Inspiratif Jateng 2023

Semarang (17/01) — Anggota DPR RI Dapil Jateng 1 dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya meraih penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Jawa Tengah 2023 pada ajang Peluncuran Buku dan Penghargaan 40 Tokoh Inspiratif Jawa Tengah

yang diselenggarakan oleh surat kabar Suara Merdeka di Gedung Gradhika Bakti Praja Kota Semarang, Sabtu (13/01/2024).

Wisnu Wijaya masuk dalam jajaran 40 tokoh inspiratif Jawa Tengah bersama dengan sejumlah tokoh nasional di antaranya Dr (HC) Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya (Dewan Pertimbangan Presiden), Dr (HC) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus (Kiai sekaligus budayawan), Irjen Ahmad Luthfi (Kapolda Jateng), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Prof. KH. Noor Ahmad (Ketua Baznas RI) dan tokoh terkemuka lainnya.

Sebagai satu-satunya Anggota DPR RI yang berhasil menerima penghargaan tersebut,

Wisnu Wijaya dinilai memiliki dedikasi dan kontribusi yang besar dalam memperjuangkan aspirasi warga dari dapil Jawa Tengah 1 yang meliputi Kota dan Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Salatiga.

“Kami memandang (anugerah) ini sebagai wujud penilaian publik yang bernilai positif. Capaian ini menjadi penyemangat sekaligus bentuk kepercayaan warga terhadap kami untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kontribusi kami dalam melayani dan membela kepentingan warga Jateng 1,” kata Wisnu dalam keterangannya di Kota Semarang, Selasa (16/01/2024).

Legislator PKS ini mengatakan, jabatan sebagai

anggota DPR merupakan amanah politik yang wajib ditunaikan secara terhormat dan penuh tanggung jawab.

Untuk itu, sebagai seorang politisi muslim Wisnu mengajak untuk meneladani empat jalan politik Rasulullah SAW yang selama ini menjadi filosofi politiknya. Di antara empat jalan politik tersebut adalah politik kebangsaan, politik pemberdayaan, politik silaturahmi, dan politik spiritual.

Pertama, Wisnu menjelaskan politik kebangsaan adalah usaha menjadikan politik sebagai alat untuk merawat kebhinekaan, menjaga kepentingan bangsa, dan menjaga kedaulatan rakyat dan negara.

“Kemudian politik pemberdayaan adalah upaya memanfaatkan politik sebagai sarana untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat dengan menyediakan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Ini yang telah kami lakukan selama ini melalui berbagai skema program advokasi untuk pemberdayaan warga Jateng 1 dari segi sosial dan ekonomi,” terang Wisnu.

Selanjutnya, sambung Wisnu, adalah politik silaturahmi. Ini adalah jalan politik yang mengedepankan titik temu dalam merespons berbagai perbedaan yang ada melalui dialog dan silaturahmi yang membangun.

“Tujuannya adalah memperkuat persaudaraan sebagai



politik silaturahmi. Ini adalah jalan politik yang mengedepankan titik temu dalam merespons berbagai perbedaan yang ada melalui dialog dan silaturahmi yang membangun.

## H. WISNU WIJAYA, SE, MM.

Anggota Komisi VIII DPR RI

sesama anak bangsa dan bergotong royong membangun gagasan untuk kemajuan Indonesia,” ucap Wisnu yang sedang menjabat sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI.

Terakhir, ucap Wisnu, adalah politik spiritual. Ini adalah prinsip dan keyakinan untuk selalu menghadirkan perasaan selalu diawasi oleh Tuhan dalam menjalankan

setiap amanah yang diemban. “Perasaan selalu merasa diawasi adalah kunci membangun integritas. Dan seorang pemimpin masyarakat dinilai dari integritasnya, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perilakunya,” ujar Wisnu yang kembali dipercaya sebagai Caleg PKS DPR RI Dapil Jateng 1.





## Iskan Qolba Lubis Hadiri Seminar Peningkatan FKUB dan Penguatan moderasi Beragama Angkatan II

Medan (23/01) — Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menghadiri seminar peningkatan kapasitas aktor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),

dalam penguatan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Kantor Kemenag Padang Lawas, Selasa, (21/1/24), di Cafe Gelas Baru Sibuhuan Kecamatan Barumun.

Seminar yang diadakan di Cafe Gelas Baru Sibuhuan melibatkan ASN 10 orang tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat sebanyak 40 orang, serta menjadi wadah untuk membahas kendala dan masukan masyarakat dalam kehidupan beragama.

Dalam arahnya, Iskan yang juga sebagai pemateri seminar, menyampaikan urgensi moderasi beragama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan toleran.

Dijelaskannya, moderasi beragama tidak hanya ditujukan untuk satu agama tertentu, melainkan untuk semua agama, mengingat potensi ekstremisme bisa muncul dalam berbagai keyakinan.

"Peran moderasi beragama akan mendukung terciptanya stabilitas keamanan

di daerah" ucapnya.

Pada kesempatan itu, Afnan Siregar, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Binmas) Kementerian Agama Padang Lawas, turut memberikan paparan tentang pentingnya moderasi beragama sebagai langkah untuk menangkis perkembangan agama yang merusak kehidupan bermasyarakat.

Ia menekankan bahwa NKRI tidak mengatur agama, namun negara menjamin

terlaksananya agama sesuai keyakinan masing-masing dalam masyarakat.

Selain itu, Afnan menyoroti pentingnya ajaran harmonisasi yang harus dimulai dari keluarga.

Pancasila dianggap sebagai nilai-nilai yang merangkum ajaran agama, dan moderasi beragama diharapkan dapat membantu mewujudkan harmoni di tengah-tengah masyarakat.

Pada kegiatan itu, Para tokoh agama juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan guna peningkatan moderasi beragama di Kabupaten Padang Lawas.

”  
Moderasi beragama tidak hanya ditujukan untuk satu agama tertentu, melainkan untuk semua agama, mengingat potensi ekstremisme bisa muncul dalam berbagai keyakinan. Peran moderasi beragama akan mendukung terciptanya stabilitas keamanan di daerah”

**H. ISKAN QOLBA  
LUBIS, M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI



# Serap Aspirasi Masyarakat, Nevi Zuairina Sampaikan Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia

Payakumbuh (29/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Nevi Zuairina melakukan kegiatan kedewanan berupa Aspirasi Masyarakat yang menghadirkan berbagai elemen masyarakat termasuk pemuda, akademisi, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil.

Nevi menyampaikan Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia yang menghadirkan perangkat elemen masyarakat yang berasal dari kota Payakumbuh.

Dalam sambutannya, Nevi Zuairina menekankan betapa pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

"Demokrasi bukan hanya tentang pemilu. Ini tentang partisipasi kita semua, setiap hari, dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintahan," ujar politisi PKS ini.

Acara ini menyediakan platform bagi para peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia.

Nevi Zuairina memaparkan bagaimana pendidikan politik, transparansi pemerintah, dan penguatan lembaga demokrasi dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi.

Salah satu segmen yang paling dinantikan adalah sesi diskusi interaktif, di mana peserta berkesempatan untuk

berdialog langsung dengan Nevi Zuairina yang merupakan anggota MPR RI.

Topik yang dibahas sangat beragam, mencakup peran media dalam demokrasi, strategi mengatasi polarisasi politik, dan banyak lagi.

Peran pemuda dalam demokrasi mendapatkan sorotan khusus dalam sesi serap aspirasi ini.

"Kami memerlukan suara dan tindakan pemuda untuk membentuk masa depan demokrasi kita," seru Nevi Zuairina, mengajak generasi

muda untuk lebih aktif berpartisipasi dalam politik.

Pendidikan demokrasi juga menjadi topik penting. Anggota DPR RI yang kini duduk di Komisi VI ini mendorong institusi pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam kurikulum, demi mencetak warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab.

Antusiasme peserta terlihat jelas dari tanggapan dan pertanyaan yang diajukan. Mereka menyampaikan berbagai perspektif dan usulan untuk memperbaiki praktik demokrasi di Indonesia.

Di akhir acara, Nevi Zuairina menyampaikan harapan agar diskusi seperti ini dapat terus berlangsung di seluruh Indonesia.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memperkuat demokrasi," tuturnya menutup pembicaraan.

betapa pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu. Ini tentang partisipasi kita semua, setiap hari, dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah,"

**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II



Salurkan Bantuan bagi  
Korban Kebakaran,

**Wisnu Wijaya  
Prioritaskan  
Bantuan Bedah  
Rumah dan  
Modal Usaha**

**Semarang (22/01) —** Musibah kebakaran yang terjadi di Dukuh Kebontaman RT 01/09 Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang mendapat perhatian dari Anggota Fraksi PKS Wisnu Wijaya.

Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, musibah tersebut membuat 2 unit rumah terdampak dimana salah satunya ludes terbakar beserta seluruh isinya serta ikut menghanguskan tempat peternakan lele dan entok yang menjadi sumber nafkah bagi korban.

Wisnu Wijaya yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi VIII DPR merespons musibah tersebut dengan segera mendatangi lokasi kebakaran.

Selain meninjau lokasi musibah, Wisnu turut membawa bantuan logistik berupa perlengkapan tidur, makanan siap saji, sembako, peralatan mandi, serta kebutuhan dasar lain yang dibutuhkan korban.

"Innalillahi wa innailaihi raji'un. Kami menyampaikan rasa keprihatinan kami atas musibah yang menimpa warga kami, Bapak Musdi (68) sekeluarga. Kami doakan agar senantiasa diberikan ketabahan. Kami berharap bantuan yang kami berikan bisa sedikit meringankan beban keluarga atas musibah yang terjadi," tutur Wisnu saat meninjau lokasi kebakaran, Sabtu

(20/1/2024).

Di hadapan pihak Balai Sentra Terpadu Kartini Kementerian Sosial yang turut mendampingi di lokasi bencana, Legislator Dapil Jateng 1 ini mengusulkan agar korban memperoleh prioritas bantuan bedah rumah dan bantuan modal usaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

"Kami telah usulkan agar kebutuhan dasar korban bisa segera ditindaklanjuti khususnya terkait kebutuhan tempat tinggal dan berusaha. Sebab kami memahami bahwa kebutuhan untuk kembali memiliki daya sosial dan ekonomi di tengah masyarakat menjadi hal yang patut diperhatikan bagi penyintas bencana untuk menghi-

langkan trauma," jelas Wisnu.

Sementara itu, korban musibah kebakaran, Musdi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Anggota DPR RI Wisnu Wijaya dan Kementerian Sosial RI terhadap keluarganya.

"Alhamdulillah kami bersyukur sekaligus haru dengan kedatangan Anggota DPR dan Kemensos yang berkenan mengunjungi kami dan memberikan bantuan. Kebutuhan makanan dan sembako menjadi hal yang sangat kami butuhkan saat ini selagi kami masih ditampung oleh tetangga untuk tinggal sementara waktu," tandasnya.

Selain Anggota DPR RI Wisnu Wijaya, turut hadir membersamai di lokasi musibah di antaranya Anggota DPRD Kota Semarang Jauhar Awwaludin, perwakilan Balai Sentra Terpadu Kartini Kemensos RI, koordinator tingkat kecamatan Tembalang Aksi Peduli Sedulur Mas Wisnu (Semawis) Aziz Aulia.

**"Kami telah usulkan agar kebutuhan dasar korban bisa segera ditindaklanjuti khususnya terkait kebutuhan tempat tinggal dan berusaha.**

**H. WISNU WIJAYA, SE, MM.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

*Live*  
*Interactive*

Bersama  
Anggota  
Legislatif PKS



BERSAMA ARI PUTRA UTAMA



**Saksikan**  
**Setiap Jum'at**  
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB





## Terima Kunjungan SMK Pembangunan, Mardani Ali Sera Ajak Siswa-siswi Melek Informasi

Jakarta (16/01) -- Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, Menerima kunjungan dari SMK Pembangunan Utan Kayu Utara Jakarta Timur di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (16/01)

Dalam kunjungannya, Mardani Ali Sera, menyambut dengan baik kedatangan siswa-siswi dari SMK Utan Kayu Utara ini serta menjelaskan mengenai DPR RI.

"Selamat datang di gedung perwakilan rakyat, disinilah rumah rakyat, rumah kalian, saya hanya perwakilan yang membantu mengurus permasalahan rakyat. Gedung ini tempat dimana kita dibahas segala permasalahan-permasalahan rakyat meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya," ucapnya.

Anggota Komisi II ini juga menjelaskan akan adanya bonus demografi yang di Indonesia yang harus di jaga dengan baik.

"Indonesia akan dihadapkan oleh bonus demografi. Bonus demografi ini harus di manfaatkan dengan baik, harus di didik dengan baik kalau enggak akan menghasilkan demografi yang negatif seperti misal seperti melakukan narkoba, pencuri, judi. Sebagai akibat dari anak muda tak di urus. Misal 1

daerah tidak ada lapangan bola, maka anak-anak di daerah tersebut tidak ada kesempatan untuk menyalurkan hobinya. Nah ini dibahas di rapat nanti kita sampaikan dan wakil rakyat akan memberikan dana yang sudah di sepakati para wakil rakyat yang akan di berikan kepada kelurahan disana untuk membuat lapangan bola. Ini

bentuk fungsi anggaran," ungkapnya.

Diakhir Mardani berpesan kepada siswa-siswa untuk mulai aktif mencari informasi-informasi yang

"Saya titip pesen, kalian akan tahu sedikit maka akan sedikit, tapi kalau mau banyak pasti akan banyak. Maksudnya sekarang ini informasi sangat mudah dicari, apalagi sekarang ada google, internet. Maka dari itu kalian harus melek akan informasi yang ada dan harus bisa menyeleksi informasi-informasi yang benar dan akurat," tutupnya.

"Indonesia akan dihadapkan oleh bonus demografi. Bonus demografi ini harus di manfaatkan dengan baik, harus di didik dengan baik kalau enggak akan menghasilkan demografi yang negatif seperti misal seperti melakukan narkoba, pencuri, judi. Sebagai akibat dari anak muda tak di urus. Misal 1 daerah tidak ada lapangan bola, maka anak-anak di daerah tersebut tidak ada kesempatan untuk menyalurkan hobinya.

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**  
Anggota Komisi II DPR RI





## Terima Kunjungan Warga Beji Depok, Ledia Hanifa Ajak Lebih Cermat Gunakan Hak Pilih

Jakarta (17/01) — Anggota Komisi X sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menerima kunjungan dari Konstituen dari Yayasan Bina Amal Shaleh Depok- Jawa Barat di Ruang Badan Musyawarah DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/01).

Pada kesempatan ini, Konstituen Depok-Jawa Barat Ledia Hanifa yang berjumlah 120 orang tersebut mengunjungi Fraksi PKS DPR RI dalam rangka menyalurkan aspirasi dan memperkaya pengetahuan mengenai lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).  
Anggota Komisi X DPR RI

"Sebentar lagi menjelang pemilu, harapannya bapak/ibu dapat memilih dengan cermat, dilihat kiprah dan latar belakangnya, apakah calon anggota legislatif yang akan dipilih bapak/ibu apakah memenuhi kriteria dan bisa atau tidak anggota yang dipilih tersebut melaksanakan 3 fungsi DPR tadi (Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi) dengan baik,"

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

tersebut juga menyampaikan bahwa pentingnya kita mengetahui bagaimana mekanisme bekerjanya para anggota-anggota DPR RI. Ledia juga mengajak para konstituen agar lebih cermat dalam menggunakan hak pilih menjelang pemilihan umum nanti dengan cara mencari tahu latar belakang kiprah dan latar belakangnya.

"Sebentar lagi menjelang pemilu, harapannya bapak/ibu dapat memilih dengan cermat, dilihat kiprah dan latar belakangnya, apakah calon anggota legislatif yang akan dipilih bapak/ibu apakah memenuhi kriteria dan bisa atau tidak anggota yang dipilih tersebut melaksanakan 3 fungsi DPR tadi (Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi) dengan

baik," ujarnya.

Selain itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI tersebut juga menyinggung kiprah Fraksi PKS yang selalu berkomitmen untuk membela kepentingan rakyat.

"Alhamdulillahnya kami di Fraksi PKS, selalu punya komitmen untuk membela kepentingan masyarakat, oleh karena itu mohon doanya bapak/ibu agar kami senantiasa selalu diberikan kesehatan agar bisa lebih memaksimalkan lagi dalam menyuarakan aspirasi bapak/ibu sekalian," ungkapnya.

Diakhir, Anggota Komisi X DPR RI ini mengungkapkan banyak terima kasih atas kunjungan aspirasi dari Yayasan Bina Amal Shaleh Depok-Jawa Barat tersebut, dan agenda aspirasi ditutup dengan sesi foto bersama.



Terima Aspirasi Warga Terkait Perampasan Tanah

## Jazuli Juwaini: Rakyat Berhak Dapat Keadilan dan Kesejahteraan!

Jakarta (23/01) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menerima aspirasi dari Kelompok Masyarakat Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten

di Ruang Rapat Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/01).

Agenda dari pertemuan ini, yakni membahas mengenai tuntutan atas perampasan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Kelompok

Masyarakat Desa Jayasari secara sepihak oleh Pemilik Penambangan Pasir Jayabaya.

"Kami telah menyampaikan tuntutan ke berbagai instansi dan Alhamdulillah pada akhirnya kami berharap Fraksi PKS DPR RI dapat mewujudkan aspirasi kami agar pihak yang berwenang dapat menangkap aktor intelektual dibalik perampasan tanah dan bangunan kami akibat penambangan pasir." ungkap Kuasa Hukum Kelompok Masyarakat Desa Jayasari.

Anggota Komisi I DPR RI tersebut mengungkapkan bahwa pada dasarnya aspirasi tersebut akan diteruskan

kepada komisi terkait, yakni Komisi II dan III untuk dibahas lebih lanjut perihal penyelesaiannya.

"Semua rakyat berhak untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, kami akan memperjuangkan aspirasi dan tuntutan ini kepada komisi terkait sehingga akan dapat dibahas lebih lanjut mengenai penyelesaiannya." tegas Jazuli.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan Surat Tuntutan dari Perwakilan Kelompok Masyarakat Desa Jayasari kepada Fraksi PKS DPR RI sebagai bentuk laporan dan data-data terkait permasalahan yang ada pada desa tersebut.

"Kami telah menyampaikan tuntutan ke berbagai instansi dan Alhamdulillah pada akhirnya kami berharap Fraksi PKS DPR RI dapat mewujudkan aspirasi kami agar pihak yang berwenang dapat menangkap aktor intelektual dibalik perampasan tanah dan bangunan kami akibat penambangan pasir."

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



## Fraksi PKS DPR RI Terima Kunjungan Partai Amanah Negara (AMANAH) Malaysia

Jakarta (23/01) – Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, Ledia Hanifa Amaliah, dan Mardani Ali Sera menerima kunjungan Partai Amanah Negara (AMANAH) Malaysia di Ruang Ketua Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/01/2024).

Kunjungan ini sebagai bentuk dari pembelajaran mengenai organisasi baik terkait Fraksi PKS DPR RI maupun Partai Amanat Negara (AMANAH), sehingga diharapkan dapat membina rakyat di Indonesia maupun Malaysia untuk mendapatkan kesejahteraan. "PKS, dari pengamatan kami sama-sama memiliki

"PKS tentu banyak menolak Rancangan Undang-Undang yang tidak pro terhadap rakyat, hal tersebut diungkapkan karena PKS merupakan oposisi dari kabinet pemerintah yang sekarang, namun kebijakan yang ditolak tidak serta-merta semuanya ditolak, terlebih yang akan merugikan rakyat.

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

tujuan yang sama, yakni bertujuan untuk membina basis umat Islam yang amat banyak, PKS juga pernah mengunjungi Turki, Rusia, Jerman, dan Amerika untuk membuka pemikiran dalam mewujudkan peran di kancah dunia." ujar Badlishah Sham.

Dalam kunjungan ini, Jazuli Juwaini mengungkapkan mengenai sikap PKS yang paling keras ke pemerintah dalam memberikan kritik substansial dan kontrol terhadap pemerintah dengan memberi solusi dan alternatif.

"PKS tentu banyak menolak Rancangan Undang-Undang yang tidak pro terhadap rakyat, hal tersebut diungkapkan karena PKS merupakan oposisi dari kabinet pemerintah yang sekarang, namun kebijakan yang ditolak

tidak serta-merta semuanya ditolak, terlebih yang akan merugikan rakyat." tegas Jazuli.

PKS juga terus menyoal kesetaraan gender bagi perempuan untuk memiliki andil dalam Demokrasi di Indonesia, dalam bentuk PKS yang merupakan satu-satunya partai memenuhi kuota Calon Legislatif perempuan di seluruh daerah pemilihan.

"Tentu dalam menyoal kesetaraan PKS telah membuktikan dengan pemenuhan kuota Calon Legislatif perempuan di seluruh daerah pemilihan." ujar Ledia.

Kegiatan tersebut ditutup dengan pemberian plakat sebagai bentuk buah tangan yang diberikan kepada Ketua Majelis Syuro Partai Amanat Negara (AMANAH)



## Terima Kunjungan Siswa SMP Islam An-Nazhir, Aleg PKS Sampaikan Pentingnya Iman dan Ilmu dalam Pendidikan

Jakarta (23/01) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini bersama Anggota Fraksi PKS DPR RI, Habib Fahmy Alaydroes menerima kunjungan dari SMP Islam An-Nazhir Boarding School Serang

di Ruang Rapat Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/01).

Kunjungan kali ini memiliki agenda untuk pemberian motivasi dan kegiatan pembelajaran politik bagi para siswa/siswi yang hadir.

“Kalian berada di level SMP. Ini adalah kesempatan emas untuk kalian serius belajar dan menimba ilmu. Selamat datang untuk kalian semua, gunakan masa emas ini untuk belajar semaksimal mungkin,”

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Sebuah kehormatan kami bisa hadir disini, di tempat perwakilan masyarakat. Sehingga kami bisa belajar banyak bagaimana peran anggota dewan untuk menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat.” ujar Ema selaku Kepala Sekolah dari SMP Islam An-Nazhir.

Kegiatan dibuka oleh sambutan dari Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, dengan memberikan ucapan selamat datang serta penjelasan fungsi DPR. Jazuli juga menyampaikan motivasi terkait pentingnya ilmu dan iman sebagai bekal menjadi orang yang sukses.

“Kalian berada di level SMP. Ini adalah kesempatan emas untuk kalian serius belajar dan menimba ilmu. Selamat datang untuk kalian

semua, gunakan masa emas ini untuk belajar semaksimal mungkin,” ujar Jazuli sebagai pembuka.

Penjelasan selanjutnya disampaikan oleh Fahmy Alaydroes yang juga merupakan Anggota Komisi X DPR RI.

Fahmy membuka sesi dengan menjelaskan gambaran terkait tugas dan fungsi Komisi X yang membidangi pendidikan dan pariwisata.

“DPR Komisi X memastikan anggaran dipergunakan sebaik baiknya untuk berlangsungnya pendidikan nasional di seluruh Indonesia.” jelas Fahmy.

Kunjungan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta kunjungan dan ditutup dengan sesi dokumentasi serta penyerahan cinderamata.





## Terima Aspirasi Warga Pabuaran, Fahmy Alaydroes : Aduan Akan Diteruskan ke Komisi V

Jakarta (23/01) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V, Fahmy Alaydroes,

menerima aspirasi dari Kelompok Masyarakat Suara Warga Pabuaran, Bojong Gede, Kabupaten Bogor di Ruang Rapat Fraksi PKS, Gedung

”Kami akan usahakan dengan segera agar pembahasan terkait aspirasi ini dapat dibahas saat rapat Komisi V, sehingga pengkajian solusi masalah dapat berpihak kepada Warga Pabuaran, Bojong Gede.”

**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed**

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Jawa Barat V

Nusantera I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/01).

Agenda dari pertemuan ini, yakni membahas mengenai tanah dan bangunan Warga Pabuaran yang terdampak pengrusakan akibat Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) Seksi III, adapun permasalahan lainnya ialah uang ganti rugi yang diberikan juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

”Saya sebagai perwakilan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V akan meneruskan aspirasi bapak dan ibu terkait pengrusakan yang diakibatkan oleh Pembangunan Jalan Tol Desari kepada Komisi yang membidangi permasalahan ini.” jelas Fahmy.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V tersebut kemudian juga menegaskan akan menyampaikan ke Anggota DPR

RI Fraksi PKS yang berada di Komisi V agar permasalahan ini dapat segera teratasi.

”Kami akan usahakan dengan segera agar pembahasan terkait aspirasi ini dapat dibahas saat rapat Komisi V, sehingga pengkajian solusi masalah dapat berpihak kepada Warga Pabuaran, Bojong Gede.” tegas Fahmy.

Lebih lanjut Fahmy meminta kepada Kelompok Masyarakat Suara Warga Pabuaran, Bojong Gede, untuk memberikan semua data-data terkait pengaduan tersebut agar nanti laporannya kuat untuk dibahas.

”Yang penting nanti kita minta kelengkapan data-data semuanya, biar nanti saat dibahas di Komisi V laporannya kuat dan kredibel.” tutup Fahmy.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Salurkan*  
**ASPIRASI ANDA**  
**DI HARI ASPIRASI**  
**FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>



## Hadiri Kegiatan di Dapil, Habib Aboe Ajak Warga Bubuhan Banjar jangan Golput

Banjar (25/01) — Sudah dekatnya dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu), Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Kalsel Aboe Bakar Alhabsyi

mengingatkan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Habib Aboe ini dalam kegiatan Empat Pilar

“Nyoblosnya tidak lama, paling lima menit. Namun ini dampaknya akan dirasakan selama 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan baik baik hak pilih kita. Kita semua harus datang ke TPS dan memberikan aspirasi politik kita,

### HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

MPR RI, yang diselenggarakan (24/01) di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

Habib Aboe mengingatkan, bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Kalsel sangat rendah.

“Kalau dilihat di Pemilu 2019 kemarin angka yang tidak memberikan pilihan adalah 17,39 persen. Kemudian angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 di Kalimantan Selatan hanya sekitar 60,6 persen dari 2,7 juta warga yang masuk daftar pemilih tetap. Tercatat lebih satu juta warga golput dalam Pilkada,” terang Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

“Saya kembali mengingatkan, agar kita mengingat semua dan meluangkan waktu untuk datang ke TPS pada 14 Februari

nanti,” papar Anggota DPR RI tersebut dengan nada menekankan kepada para peserta yang hadir.

Aboe Bakar menyampaikan pentingnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi di Pemilu 2024 nanti.

“Nyoblosnya tidak lama, paling lima menit. Namun ini dampaknya akan dirasakan selama 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan baik baik hak pilih kita. Kita semua harus datang ke TPS dan memberikan aspirasi politik kita,” terang Sekretaris Jenderal DPP PKS tersebut.

“Oleh karenanya bubuhan Banjar jangan Golput, kita ingatkan saudara-saudara kita untuk datang ke TPS di 14 Februari 2024 nanti”, tutupnya.



## Dukung Permohonan Advisory Opinion, HNW: Menu Perkuat Usaha agar Israel Dikenakan Sanksi

Jakarta (20/01) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendukung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan tampil menyampaikan pernyataan secara lisan

dalam permohonan advisory opinion (nasehat hukum) ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) atas kejahatan-kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina apalagi terhadap Gaza, yang secara berkelanjutan telah secara terbuka melanggar hukum internasional.

Pemerintah juga, imbuh Hidayat, perlu mengingatkan agar diperkuat usaha lain dan argumentasi hukumnya harus diperkuat, dengan tidak meninggalkan langkah-langkah hukum lain yang lebih efektif seperti dukungan terhadap langkah Afrika Selatan.

"Kita semua tentu mendukung setiap upaya untuk menghukum Israel atas kejahatan dan pelanggaran hukum internasional yang

dilakukannya terhadap rakyat Palestina. Salah satunya dengan meminta advisory opinion (nasehat hukum) ke ICJ melalui Majelis Umum PBB ini," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (20/01).

HNW sapaan akrabnya mengatakan permintaan advisory opinion ini memang telah lama disampaikan oleh majelis umum PBB, yakni pada 17 Januari 2023 lalu, jauh sebelum kondisi Jalur Gaza semakin memanas atas serangan brutal Israel dalam beberapa pekan terakhir.

"Indonesia telah menyampaikan pernyataan tertulis kepada ICJ pada Juli 2023 lalu, dan dijadwalkan menyampaikan pernyataan secara lisan pada 19 Februari 2024 mendatang," pungkasnya.

Lebih lanjut, HNW menyadari bahwa fokus dari permohonan advisory opinion ini adalah menyangkut berbagai kebijakan Israel seperti aneksasi wilayah Palestina, pemukiman di Tepi Barat, serta mengubah status Kota Yerusalem, yang semuanya tidak sah menurut hukum internasional.

"Jadi memang fokusnya berbeda dengan gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan ke ICJ beberapa waktu lalu," ujarnya.

Status atau kekuatan hukum advisory opinion ini memang juga berbeda dengan gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan. Jika putusan atas gugatan Afsel itu akan berkekuatan hukum mengikat (legally binding), sedangkan advisory opinion ini cenderung mengikat secara moral (morally binding).

"Jadi ini yang perlu dipahami oleh publik terkait efektivitas dari langkah pemerintah Indonesia," tuturnya.

Oleh karena itu, HNW meminta agar selain berjuang melalui permohonan advisory opinion yang sudah diproses sejak tahun lalu melalui Majelis Umum PBB ini, Indonesia juga benar-benar mendukung dan memperkuat gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan, karena putusannya dapat mengikat para pihak, termasuk Israel, atas kejahatan perang, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang



"Semua langkah harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembelaan terhadap rakyat Palestina yang masih terjajah sesuai dengan komitmen di dalam konstitusi kita, UUD NRI 1945 yang menghendaki diakhirinya segala bentuk penjajahan.

**Dr. H.M. HIDAYAT  
NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

dilakukannya terhadap rakyat di Gaza dan Palestina.

"Semua langkah harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembelaan terhadap rakyat Palestina yang masih terjajah sesuai dengan komitmen di dalam konstitusi kita, UUD NRI 1945 yang menghendaki diakh-

irinya segala bentuk penjajahan. Jadi, selain fokus memperkuat permohonan advisory opinion tersebut, Menu juga harus aktif berkomunikasi dengan pihak Afsel yang saat ini menjadi ujung tombak menjerat Israel atas kejahatan yang dilakukannya di ICJ," pungkasnya.




Saat ini PKS merupakan **satu-satunya partai** di parlemen yang masih menjalankan fungsi oposisi yang mengawasi jalannya roda pemerintahan.

# Memilih **PKS** Menjaga Demokrasi





**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)
-  Twitter  
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV DPR RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***